

Laporan Penelitian

# UNIT CORE SANTRI FONDOR DI SUMATERA UTARA

Peneliti

Dr. AL RASYIDIN, M.Ag  
RUSYDI ANANDA, M.Pd  
NELIWATI, M.Pd



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN  
MASYARAKAT (LP2M)  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2016



Laporan Penelitian

**UNIT COST SANTRI PONDOK DI SUMATERA UTARA**

**Peneliti**

**Dr. AL RASYIDIN, M.Ag**

**RUSYDI ANANDA, M.Pd**

**NELIWATI, M.PD**



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN  
MASYARAKAT (LP2M)  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2016**



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, penulis ucapkan karena penelitian ini telah rampung peneliti lakukan. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad saw, semoga kelak kita semua mendapat syafaatnya. Amin.

Penelitian ini tentu banyak menemukan hambatan dan halangan dalam penelusuran berbagai sumber buku bacaan yang dianggap sebagai buku premier, namun karena keseriusan yang sangat dalam dari lubuk hati yang paling dalam, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dalam waktu yang sangat relative panjang dari waktu yang telah ditentukan. Semoga penelitian yang sangat sederhana ini mengenai **Unit Cost Santri Pondok Di Sumatera Utara**. Dan semoga penelitian ini bermanfaat, bagi para peneliti yang lain yang tertarik dengan judul penelitian ini.

Akhirnya, terlepas dari kekurangan dan kelebihan penelitian ini, penulis harapan semoga penelitian ini dapat berguna bagi para pembaca dan penulis sendiri.

Medan, 07 Oktober 2016

**Dr. AL RASYIDIN, M.Ag**



## DAFTAR ISI

	Hlm
Kata Pengantar .....	iii
Abstrak .....	v
Daftar Isi .....	vii
Daftar Tabel .....	ix
 <b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kegunaan Penelitian .....	6
E. Metodologi Penelitian	8
1. Desain Penelitian .....	8
2. Populasi Penelitian .....	9
3. Sampel Penelitian .....	9
4. Tipologi Sampel .....	12
5. Instrumen Penelitian .....	16
6. Sumber Data .....	16
7. Teknik Pengolahan dan Analisis Data ...	17
 <b>BAB II      KERANGKA TEORI DAN LITERATUR               REVIEW</b>	
A. Pembiayaan Pendidikan .....	18
B. Beberapa Studi tentang Pembiayaan Pendidikan .....	28
 <b>BAB III      UNIT COST SANTRI MADRASAH               TSANAWIYAH PONDOK PESANTREN               SUMATERA UTARA</b>	
A. Sumber Dana MI's Pondok Pesantren ...	36
B. Pengeluaran/ Belanja Rutin MTs PondokPesantren .....	43
C. Pengeluaran atau Belanja Rutin Orangtua Santri .....	53



	1. Pengeluaran rutin pada awal tahun ajaran .....	53
	2. Pengeluaran rutin bulanan .....	58
BAB IV	UNIT COST SANTRI MADRASAH ALIYAH PONDOK PESANTREN SUMATERA UTARA	
	A. Sumber Dana MA Pondok Pesantren ....	61
	B. Belanja Rutin/ Pengeluaran MA Pondok Pesantren .....	65
	C. Pengeluaran atau Belanja Rutin Orangtua Santri .....	73
	a. Pengeluaran rutin pada awal tahun ajaran .....	73
	b. Pengeluaran rutin bulanan .....	80
BAB V	ANALISIS DAN DISKUSI HASIL PENELITIAN	
	A. Sumber Dana Pembiayaan Pondok Pesantren di Sumatera Utara .....	89
	B. Penggunaan atau Pemanfaatan Dana pada Pondok Pesantren Sumatera Utara .....	101
	C. Persentase Belanja Orangtua atau Keluarga Santri .....	107
	D. Besaran <i>Unit Cost</i> Konsumsi Harian dan Belanja Per Bidang Studi .....	113
	E. Diskusi Hasil Penelitian .....	118
BAB VI	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	
	A. Kesimpulan .....	124
	B. Rekomendasi .....	129
	Pustaka Acuan .....	132
	Lampiran .....	

## DAFTAR TABEL

No.	Judul Tabel	Hlm
1	Lokasi dan nama pondok pesantren sampel studi	10
2	Penyebaran sampel santri berdasarkan lokasi dan jenjang pendidikan	11
3	Penyebaran sampel berdasarkan jenjang pendidikan	12
4	Penyebaran sampel berdasarkan letak geografi	13
5	Penyebaran sampel berdasarkan status ekonomi orangtua	13
6	Penyebaran sampel berdasarkan pekerjaan orangtua	15
7	Sumber-sumber pembiayaan MTs pondok pesantren Sumatera Utara/ tahun	41
8	Jenis dan penghasilan usaha mandiri pondok pesantren	42
9	Belanja/pengeluaran MTs pondok pesantren untuk gaji dan konsumsi/ tahun	45
10	Pengeluaran MTs pondok pesantren untuk KBM/ tahun	47
11	Pengeluaran untuk insentif guru dan langganan daya dan jasa	48
12	Pengeluaran MTs pondok pesantren untuk penelitian dan kegiatan ekstra kurikuler/ tahun	49
13	Pengeluaran MTs pondok pesantren untuk pembinaan dan peningkatan kualitas guru/ tahun	50
14	Pengeluaran MTs pondok pesantren untuk belanja ATK/ tahun	51
15	Pengeluaran MTs pondok pesantren untuk pemeliharaan gedung dan sarana/ tahun	52



16	Pengeluaran orangtua santri M'l's pondok pesantren awal tahun ajaran	56
17	Pengeluaran orangtua santri MTs pondok pesantren/ bulan	59
18	Pengeluaran orangtua santri MTs pondok pesantren Sumatera Utara/ tahun	60
19	Besaran persentase pebiayaan pemerintah dan orangtua pada MA pondok pesantren Sumatera Utara/ tahun	62
20	Sumber-sumber pembiayaan MA pondok pesantren Sumatera Utara/ tahun	64
21	Belanja/pengeluaran MA pondok pesantren untuk gaji dan konsumsi/ tahun	66
22	Belanja/pengeluaran MA pondok pesantren untuk KBM/ tahun	67
23	Belanja/pengeluaran MA pondok pesantren untuk belanja daya dan jasa/ tahun	68
24	Belanja/pengeluaran MA pondok pesantren untuk insentif guru/ tahun	69
25	Belanja/pengeluaran MA pondok pesantren untuk pembinaan dan peningkatan kualitas guru/ tahun	71
26	Belanja/pengeluaran MA pondok pesantren untuk pemeliharaan gedung / sarana dan belanja ATK/ tahun	72
27	Pengeluaran orangtua santri MA pondok pesantren untuk pembelian pakaian (awal tahun ajaran)	75
28	Pengeluaran orangtua santri MA pondok pesantren untuk pembelian buku dan alat tulis (awal tahun ajaran)	76
29	Pengeluaran orangtua santri MA pondok pesantren Sumatera Utara (awal tahun ajaran)	78
30	Rata-rata pengeluaran orangtua MA pondok	81

	pesantren untuk biaya konsumsi santri/ bulan	
31	Rata-rata pengeluaran orangtua santri MA pondok pesantren untuk uang saku/ bulan	82
32	Rata-rata pengeluaran orangtua MA pondok pesantren untuk SPP/ bulan	83
33	Rata-rata pengeluaran orangtua MA pondok pesantren untuk biaya asrama/ bulan	84
34	Rata-rata pengeluaran rutin bulanan orangtua santri MA pondok pesantren Sumatera Utara/ bulan	87
35	Rata-rata pengeluaran orangtua santri MA pondok pesantren Sumatera Utara/ tahun	88
36.1	Persentase sumber biaya pendidikan MTs pondok pesantren Sumatera Utara/ tahun	98
36.2	Persentase sumber biaya pendidikan MTs pondok pesantren Sumatera Utara/ tahun	99
37	Persentase pengeluaran pondok pesantren Sumatera Utara berdasarkan komponen gaji dan non gaji/ tahun	106
38.1	Persentase pengalokasian dana yang dikeluarkan orangtua santri MTs pondok pesantren Sumatera Utara/ bulan	111
38.2	Persentase pengalokasian dana yang dikeluarkan orangtua santri MA pondok pesantren Sumatera Utara/ bulan	112
39	Unit Cost Konsumsi Santri MTs dan MA Pondok Pesantren Sumatera Utara/ hari	114
40	Besaran unit cost santri MTs dan MA pondok pesantren Sumatera Utara per bidang studi/ bulan	117



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Masalah**

Pembiayaan merupakan salah satu komponen penting yang tidak bisa dipisahkan dari penyelenggaraan pendidikan. Setiap upaya pencapaian tujuan pendidikan sangat bergantung pada ketersediaan dan dukungan dana yang memadai. Proses pendidikan pada suatu satuan pendidikan, seperti madrasah atau pesantren, tidak akan dapat terlaksana tanpa dukungan dan ketersediaan pembiayaan yang kontiniu dan memadai.

Biaya pendidikan sebenarnya memiliki cakupan yang sangat luas, yaitu meliputi semua pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan. Dalam pengertian ini, setiap keluarga misalnya harus menyediakan sejumlah dana untuk membiayai pendidikan anak-anaknya dari mulai uang sekolah, pembelian buku teks, baju seragam, tas, sepatu, buku dan alat tulis, uang transport, uang saku, biaya kursus atau les, biaya ujian dan ulangan, biaya praktikum, biaya ekstra kurikuler, dan lain-lain. Item pembiayaan tersebut akan bertambah lagi bila seorang anak harus tinggal di asrama atau *mondok* di pesantren. Dalam kasus seperti ini, seluruh biaya hidup anak dari mulai makan, minum, tempat tinggal, dan berbagai kebutuhan lainnya harus dibiayai oleh orangtua.



Dalam kenyataannya, pembiayaan pendidikan seorang santri umumnya bersumber dari biaya pribadi (*private cost*), yaitu pengeluaran orangtua atau keluarga untuk mendanai pendidikan anak-anaknya (*household expenditure*). Berbeda dengan lembaga pendidikan persekolahan, dalam konteks pesantren, *private cost* ini boleh dikata merupakan sumber pembiayaan pendidikan yang sangat dominan. Artinya, peranan pemerintah dalam pembiayaan pendidikan santri jauh lebih kecil dibanding dengan pembiayaan atau belanja yang disediakan dan dikeluarkan pemerintah untuk siswa sekolah. Padahal, dalam kenyataannya, total biaya yang dibutuhkan seorang santri agar memungkinkannya untuk *nyantri* di pondok pesantren adalah lebih besar bila dibanding dengan rekan-rekan mereka yang mengikuti proses pendidikan di lembaga pendidikan persekolahan. Hal itu dikarenakan, seorang santri harus meninggalkan rumah orangtuanya dan tinggal menetap atau *mondok* di pesantren untuk waktu sekian lama. Tentu saja berbagai konsekuensi pembiayaan harus ditanggung oleh orangtua atau santri sendiri.

Selama ini, diskursus -- apakah seminar, *workshop*, penelitian dan lain-lain -- tentang pembiayaan pendidikan cenderung hanya berfokus pada: *Pertama*, tataran makro pembiayaan, seperti sumber-sumber pembiayaan negara untuk pendidikan atau besarnya persentase biaya pendidikan yang

dialokasikan pemerintah dalam APBN. Sedangkan kajian dan telaah tentang pembiayaan pendidikan pada pondok pesantren, apalagi satuan biaya riil atau *unit cost* per santri masih jarang dilakukan. *Kedua*, kajian atau telaah tersebut seringkali mengabaikan *private cost* yang bersumber dari orangtua atau santri -- seakan-akan dianggap kurang penting -- tidak sepenting dana yang dikeluarkan pemerintah atau negara dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan sekolah. *Ketiga*; kajian tersebut juga kurang komprehensif, dikarenakan tidak sampai menghitung secara riil besaran *unit cost* yang harus dikeluarkan seorang peserta didik untuk membiayai seluruh pendidikannya. Telaah tersebut umumnya hanya menghitung jumlah dana yang dikucurkan pemerintah ke sekolah dengan cara membagi dana total dalam anggaran pendidikan (di tingkat nasional atau daerah) dengan jumlah sekolah atau siswa yang di dalamnya tercakup gaji guru dan tenaga kependidikan, biaya operasional dan pemeliharaan, dan biaya penyelenggaraan proses pembelajaran.

Selain hal-hal di atas, fokus kajian atau telaah tentang pembiayaan pendidikan juga seringkali hanya berfokus pada pendidikan persekolahan, seperti SD, SLTP, atau SLTA. Kajian dan telaah tentang pembiayaan pendidikan pada pondok pesantren, apalagi pada level besaran satuan biaya *unit cost* santri, masih sangat jarang dilakukan. Kecenderungan tersebut



menyebabkan tidak tersedianya data yang akurat dan komprehensif tentang besaran biaya yang harus dikeluarkan santri untuk menyelesaikan pendidikannya pada suatu pondok pesantren. Pada satu sisi, dampak dari kecenderungan ini adalah tidak tersedianya rujukan bagi orangtua untuk mengalokasikan dana guna membiayai pendidikan anaknya di pesantren. Kemudian pada sisi lain, pemerintah juga mengalami kesulitan untuk menghitung berapa sebenarnya besaran dana yang idealnya harus dialokasikan bagi mendukung pelaksanaan pendidikan pada pondok pesantren, khususnya bagi mendorong peningkatan mutu atau kualitas pendidikan. Hal ini bisa mendorong bagi munculnya ketimpangan dalam pembiayaan pendidikan dimana kontribusi pemerintah proporsinya lebih kecil dibanding orangtua atau masyarakat. Padahal, sesuai dengan pasal 31 UUD 1945, pendidikan merupakan amanah konstitusi yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah.

Kenyataan dan kecenderungan di atas sebenarnya merupakan dasar pemikiran yang cukup kuat bagi perlu dilakukannya penelitian tentang *unit cost* santri pada Pondok Pesantren di Sumatera Utara.

## B. Rumusan Masalah

Berdasar latar masalah di atas, maka secara umum rumusan masalah penelitian ini adalah *berapakah besaran riil unit cost santri pada Madrasah Tsanawiyah dan Aloyah pondok pesantren di Sumatera Utara?* Secara khusus, rumusan masalah tersebut dapat dijabarkan ke dalam beberapa pertanyaan berikut:

1. dari manakah asal atau sumber pembiayaan Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) pondok pesantren Sumatera Utara?
2. komponen apa saja yang harus didanai atau dibelanjakan dalam membiayai penyelenggaraan pendidikan pada MTs dan MA pondok pesantren Sumatera Utara?
3. berapakah besaran riil *unit cost* atau satuan biaya per santri yang dikeluarkan orangtua untuk mendanai seluruh komponen pembiayaan pendidikan santri pada MTs dan MA pondok pesantren Sumatera Utara?

## C. Tujuan Penelitian

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data yang akurat dan komprehensif tentang *unit cost* atau angka satuan biaya santri pondok pesantren Sumatera Utara. Sedangkan secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk:



1. mengetahui dari mana asal atau sumber-sumber pembiayaan pendidikan pada MTs dan MA pondok pesantren Sumatera Utara
2. mengetahui komponen apa saja yang harus dibiayai atau dibelanjakan oleh MTs dan MA pondok pesantren Sumatera Utara
3. mengetahui berapakah besaran riil *unit cost* atau satuan biaya persantri yang dikeluarkan atau dibelanjakan orangtua untuk mendanai seluruh komponen pembiayaan pendidikan santri pada MTs dan MA pondok pesantren Sumatera Utara
4. menganalisis besaran riil *unit cost* pendidikan santri pondok pesantren berdasarkan angka pengeluaran rata-rata satuan pendidikan pada jenjang MTs dan MA, baik yang dikeluarkan oleh keluarga atau santri maupun pondok pesantren.

#### D. Kegunaan Penelitian

Secara teoritik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi merumuskan konsep-konsep teoritis tentang ekonomi pendidikan pesantren. Sedangkan secara praktis, temuan penelitian ini diharapkan berguna sebagai data rujukan yang dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan bagi berbagai pihak yang *concern* dan

bertanggung jawab terhadap pendidikan pondok pesantren, yaitu:

1. Bagi pemerintah menjadi bahan masukan dalam merumuskan kebijakan pemberian bantuan atau subsidi dalam mendukung pelaksanaan pendidikan pada pondok pesantren, khususnya dalam memperluas akses pendidikan dan meningkatkan mutu pesantren.
2. Bagi pimpinan umum atau kyai pesantren, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam menghitung berapa besar kemungkinan biaya yang diperlukan bagi peningkatan mutu pendidikan pesantren dan pemberian subsidi kepada santri, merumuskan model penggunaan *unit cost* santri yang efektif dan efisien, dan menemukan strategi bagi diversifikasi sumber-umber keuangan atau pembiayaan pondok pesantren di masa depan.
3. Bagi masyarakat atau orangtua santri, penelitian ini diharapkan bisa memberikan data yang akurat tentang besaran riil dana yang harus disiapkan bagi mendukung pelaksanaan pendidikan anak dalam menyelesaikan studi di pondok pesantren.



## E. Metodologi Penelitian

### 1. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan *mode of inquiry quantitative non-experimental* yakni jenis penelitian yang bertujuan ... *describe something that occurred ...without any direct manipulation of conditions that are experienced.*<sup>1</sup> Pendekatan *mode of inquiry non-experimental* yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei. Menurut Masri, survei adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data yang pokok.<sup>2</sup>

Dalam melakukan survei, *the investigator selects a sample of subjects and administers a questionnaire or conducts interviews to collect data. ... research is designed so that information about a large number of people (population) can be inferred from the responses obtained from a smaller group of subjects (the sample).*<sup>3</sup>

Jenis survei yang dilakukan dalam penelitian ini adalah *survey explorative* atau penjajagan. Hal ini dilatari oleh belum tersedianya data-data yang akurat dan formal

<sup>1</sup> James H. McMillan dan Sally Schumacher, *Research in Education: A Conceptual Introduction* (New York:Longman, 2001), hlm. 33.

<sup>2</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (ed.), *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 3.

<sup>3</sup> James H. McMillan dan Sally Schumacher, *op. cit.*, hlm. 34.

berkenaan dengan topik yang distudi. Karena itu, survei ini dimaksudkan untuk melakukan pengumpulan data dan penghitungan yang cermat terhadap *unit cost* santri pondok pesantren di Sumatera Utara.

Dalam penelitian ini, langkah-langkah survei yang dilakukan diawali dari pembatasan ruang lingkup kajian, merumuskan tujuan penelitian, mengidentifikasi populasi untuk kemudian menarik sample studi secara *random*, dan selanjutnya memilih dan membuat instrumen pengumpul data. Setelah itu, dilakukan pelatihan peneliti lapangan yang dilanjutkan dengan pengumpulan data yang dibutuhkan. Setelah semua data berhasil dihimpun, langkah berikutnya adalah memeriksa dan *mentalli* seluruh item angket untuk keperluan analisis dan pembahasan hasil penelitian. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan disusun laporan penelitian

### 2. Populasi Penelitian

Populasi penelitian ini adalah seluruh pondok pesantren yang berada di wilayah propinsi Sumatera Utara.

### 3. Sampel Penelitian

Dalam penelitian survei ini, pondok pesantren yang dipilih sebagai sampel area sebanyak 14 (empatbelas) pondok pesantren yang tersebar pada 7 (tujuh) wilayah



kabupaten/kota di propinsi Sumatera Utara, yaitu (1) kota Medan, (2) kabupaten Deli Serdang, (3) kabupaten Langkat, (4) kabupaten Simalungun, (5) kabupaten Labuhan Batu, (6) kabupaten Tapanuli Selatan, dan (7) kabupaten Mandailing Natal (Madina). Dari seluruh *sample area* tersebut, masing-masing diambil dua pondok pesantren sebagai *sample studi*. Penentuan sampel dilakukan dengan teknik *random*. Berdasarkan teknik ini, maka pondok pesantren yang terpilih sebagai sampel studi adalah sebagaimana tertera pada tabel berikut:

Tabel 1: Lokasi dan nama pondok pesantren sampel studi

No	Nama Pondok Pesantren	Kota/Kabupaten
01.	Kota Medan	<ul style="list-style-type: none"> <li>o P P Al-Kautsar Al-Akbar</li> <li>o P P Raudhatul Hasanah</li> </ul>
02.	Kabupaten Deli Serdang	<ul style="list-style-type: none"> <li>o P P Darul Arafah</li> <li>o P P Hidayatullah</li> </ul>
03.	Kabupaten Langkat	<ul style="list-style-type: none"> <li>o P P. Babussalam</li> <li>o P P Ulumul Qur'an</li> </ul>
04.	Kabupaten Simalungun	<ul style="list-style-type: none"> <li>o P P Luqman</li> <li>o P P Muh. Darul Arqam</li> </ul>
05.	Kabupaten Labuhan Batu	<ul style="list-style-type: none"> <li>o P P Ahmadul Jariah</li> <li>o P P Al Ma'sum</li> </ul>
06.	Kabupaten Tapanuli Selatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>o P P Purbangal Sosopan</li> <li>o P P Al-Mukhtariyah</li> </ul>
07	Kabupaten Mandailing Natal	<ul style="list-style-type: none"> <li>o P P Musthafawiyah</li> <li>o P.P Ma'had Darul Ikhlas</li> </ul>

Dari seluruh sampel studi di atas, santri yang dijadikan sebagai responden dalam penelitian survai ini seluruhnya berjumlah 185 orang. Kecuali Pondok Pesantren Musthafawiyah Purbabaru kabupaten Madina, dari masing-masing jenjang pendidikan, diambil 10 (sepuluh) orang santri sebagai responden, yang terdiri dari 5 (lima) orang laki-laki dan 5 (lima) perempuan. Sedangkan dalam kasus pondok pesantren kabupaten Madina, jumlah responden yang diambil sebanyak 65 orang santri yang terdiri dari 30 laki-laki dan 35 perempuan. Penyebaran sampel tersebut bisa dilihat pada tabel 2 berikut:

Tabel 2: Penyebaran sampel santri berdasarkan lokasi dan jenjang pendidikan

Kabupaten/ Kota	Kota		Pinggir Kota		Jumlah
	MTs	MA	MTs	MA	
Medan	10	10	-	-	20
Deli Serdang	-	-	10	10	20
Langkat	5	5	5	5	20
Simalungun	-	-	10	10	20
Madina	-	-	25	40	65
Labuhan Batu	-	-	10	10	20
Tap. Selatan	-	-	10	10	20
Jumlah	15	15	70	85	185



#### 4. Tipologi Sampel

Sampel penelitian ini diklasifikasikan ke dalam beberapa tipologi, yaitu (1) jenjang pendidikan yang terdiri dari MTs dan MA pondok pesantren, (2) letak geografi MTs dan MA pondok pesantren yang terdiri dari pondok pesantren kota dan pinggir kota, (3) status sosial-ekonomi santri, yang terdiri dari kaya, menengah, dan miskin, dan (4) pekerjaan orangtua santri.

Bila dilihat dari jenjang pendidikan (MTs dan MA) dan lokasi pondok pesantren, maka penyebaran sampel penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3: Penyebaran sampel berdasarkan jenjang pendidikan

Kabupaten/ Kota	Kota		Pinggir Kota		Jumlah
	MTs	MA	MTs	MA	
Medan	1	1	-	-	2
Deli Serdang	-	-	1	1	2
Langkat	1	1	1	1	4
Simalungun	-	-	1	1	2
Madina	-	-	1	1	2
Labuhan Batu			1	1	2
Tap. Selatan			1	1	2
Jumlah	2	2	6	6	16

Kemudian, bila dilihat dari lokasi atau letak geografi pondok pesantren, maka penyebaran sampel penelitian ini adalah sebagaimana tertera pada tabel berikut:

Tabel 4: Penyebaran sampel berdasarkan letak geografi

Kabupaten/ Kota	Kota		Pinggir Kota		Jumlah
	MTs	MA	MTs	MA	
Medan	2	2	-	-	4
Deli Serdang	-	-	2	2	4
Langkat	1	1	1	1	4
Simalungun	-	-	2	2	4
Madina	-	-	2	2	4
Labuhan Batu	-	-	2	2	4
Tapanuli Selatan	-	-	2	2	4
Jumlah	3	3	11	11	28

Selanjutnya, bila sampel dilihat berdasarkan status sosial ekonomi orangtua santri, maka penyebaran sampel penelitian ini adalah sebagaimana tertera pada tabel berikut:

Tabel 5: Penyebaran Sampel Berdasarkan Status Ekonomi Orangtua

Kabupaten/ Kota	Kota			Pinggir Kota			Jumlah
	Ka	Men	Mis	Ka	Men	Mis	
Medan	11	9	-	-	-	-	20
Deli Serdang	-	-	-	-	17	3	20
Langkat	1	5	4	-	7	3	20
Simalungun	-	-	-	-	10	10	20
Madina	-	-	-	3	45	17	65
Lab. Batu	-	-	-	-	20	-	20
Tap. Selatan	-	-	-	2	13	5	20
Jumlah	12	14	4	5	112	38	185



Keterangan:

- Ka : Kaya, yaitu berpenghasilan rata-rata di atas Rp. 2.000.000,-/ bulan  
 Men : Menengah, yaitu berpenghasilan rata-rata antara Rp. 1.000.000,-/ sampai Rp. 1.900.000,-/ bulan  
 Mis : Miskin, yaitu berpenghasilan rata-rata di bawah Rp. 1.000.000,-/ bulan

Seterusnya, berdasarkan pekerjaan orangtua santri, maka penyebaran sampel penelitian ini adalah sebagaimana tertera pada tabel 5 berikut:

Kabupaten/ Kota	Kota							Pinggir Kota							Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
Medan	2	5	7	1	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	20
Deli	-	-	-	-	-	-	-	10	1	4	3	-	1	1	20
Serdang															
Langkat	7	2	-	-	-	-	1	2	1	2	-	-	-	5	20
Simalungun	-	-	-	-	-	-	-	7	8	-	4	-	-	1	20
Madina	-	-	-	-	-	-	-	35	13	5	9	1	-	2	65
Lab.Batu	-	-	-	-	-	-	-	10	2	3	4	1	-	-	20
Tap. Selatan	-	-	-	-	-	-	-	15	2	1	2	-	-	-	20
Jumlah	9	7	7	1	3	-	3	79	27	15	22	2	1	9	185

Keterangan:

- (1) Petani  
 (2) Pedagang  
 (3) Pegawai Negeri Sipil  
 (4) Pegawai Swasta  
 (5) TNI/Polri  
 (6) Pensiunan  
 (7) lain-lain



### 5. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian ini adalah kuesioner yang berisikan sejumlah pertanyaan tertulis berkenaan dengan *unit cost* santri pondok pesantren. Bentuk kuesioner yang digunakan adalah angket semi terbuka (*open-ended questionnaire*). Bentuk ini sengaja dipilih untuk memberi peluang atau kesempatan kepada responden guna memilih atau menuliskan sendiri secara langsung jawaban tambahan<sup>4</sup> ketika beberapa alternatif jawaban yang disediakan belum atau tidak sesuai dengan keadaan responden yang sesungguhnya. Dengan demikian, terbuka peluang yang lebih besar untuk menjarung data yang lebih mendalam dan akurat.

### 6. Sumber Data

Data penelitian ini akan dijarah dari berbagai sumber, yaitu pimpinan atau kepala satuan pendidikan jenjang MTs dan MA pondok pesantren, divisi logistik/ kepala asrama/ pengurus koperasi pondok pesantren, bendahara/ direktur keuangan pondok pesantren, dan para santri pondok pesantren.

### 7. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah seluruh data berhasil dikumpulkan, maka teknik pengolahan data dilakukan dengan menggunakan statistik deskriptif, yaitu mentransformasikan seluruh data tentang *unit cost* santri ke dalam susunan yang dapat menggambarkan atau mencirikan *unit cost* santri suatu pondok pesantren dari seluruh pondok pesantren yang diteliti. Untuk itu akan digunakan tabel-tabel distribusi frekuensi (*distribution frequency*). Hal ini selain dimaksudkan untuk mempermudah penyajian dan interpretasi data, juga untuk memudahkan para pembaca dalam memahami temuan penelitian. Selanjutnya, untuk mendeskripsikan secara lebih rinci *unit cost* santri seluruh pondok pesantren yang diteliti, maka digunakan pengukuran tendensi sentral dengan menggunakan nilai rerata (*mean*).

---

<sup>4</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *op. cit.*, hlm. 178.



## BAB II

### KERANGKA TEORI DAN LITERATUR REVIEW

#### A. Pembiayaan Pendidikan

Pembiayaan merupakan salah satu variabel penting dalam pelaksanaan pendidikan. Tidak ada suatu aktivitas pendidikan yang tidak membutuhkan dana atau pembiayaan. Pengangkatan dan penempatan guru, penyediaan sarana dan sumber belajar, pembelian buku-buku teks dan alat pembelajaran, seluruhnya membutuhkan dana. Demikian pula, perancangan sistem dan program pendidikan yang melibatkan tenaga ahli, pejabat birokrasi, dan *stake holder* pendidikan membutuhkan pembiayaan. Dapat dikemukakan bahwa dari mulai perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, pengawasan, dan evaluasi pendidikan membutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit.

Secara umum, pembiayaan pendidikan menyangkut bagaimana mencari dana atau sumber dana dan bagaimana pula menggunakannya dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang ada, modal kerja yang tersedia, dan merencanakan kebutuhan pembiayaan pendidikan di masa depan.

Dalam kenyataannya, dilihat dari sumber pendanaan, pembiayaan pendidikan umumnya berasal dari pemerintah, masyarakat, dan sumber-sumber lainnya.<sup>1</sup> Secara spesifik, sumber pembiayaan pemerintah bisa berasal dari pendapatan negara dari sektor pajak, pendapatan dari sektor non-pajak, keuntungan dari sektor barang dan jasa, usaha-usaha negara lain, seperti divestiasi saham pada BUMN, dan bantuan dalam bentuk hibah (*grant*) atau pinjaman luar negeri (*loan*).<sup>2</sup> Kemudian sumber pendanaan masyarakat bisa pula berasal dari orangtua, keluarga, atau masyarakat dalam arti luas. Sedangkan sumber-sumber lainnya bisa berasal dari badan-badan atau yayasan swasta penyandang dana pendidikan, baik dari dalam maupun luar negeri.

Dalam tataran praktis, pemerintah sering disebut sebagai penyandang utama pembiayaan pendidikan. Statemen ini setidaknya dilatari oleh dua hal. *Pertama*, secara konstitusional, pemerintah disebut sebagai pihak yang bertanggung jawab mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam konstitusi secara tegas dinyatakan

<sup>1</sup> Mintarsih Danumihardja, *Manajemen Keuangan Sekolah* (Jakarta: Uhamka Press), 2004, hlm. 54-57.

<sup>2</sup> Dedi Supriyadi, *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah* (Bandung: Remaja Rosdakarya), 2003, hlm. 5.



bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari total APBN serta APBD untuk kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.<sup>3</sup> Kedua, dalam kenyataannya, pemerintah memang merupakan unsur yang terlibat secara langsung dalam merencanakan, melaksanakan, dan sekaligus mengevaluasi seluruh program dan aktivitas pendidikan. Penyediaan gedung, sarana pembelajaran, pengangkatan guru dan pegawai, perancangan, pembaharuan, dan perubahan kurikulum, adalah diantara contoh konkrit keterlibatan langsung pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan.

Dalam konteks pembiayaan, pada setiap tahun anggaran, pemerintah menyusun dan mengalokasikan sejumlah dana untuk membiayai program dan pelaksanaan pendidikan. Dana yang dialokasikan tersebut umumnya digunakan untuk membiayai operasional pendidikan, dari mulai gaji guru dan pegawai, pembangunan dan pemeliharaan gedung/sarana, penyediaan sarana, fasilitas, dan alat pembelajaran, bahkan sampai pemberian beasiswa dan riset kependidikan.

Di Indonesia, biaya pendidikan dari pemerintah umumnya berasal pemerintah pusat dan daerah. Anggaran pembiayaan yang bersal dari pemerintah pusat bersumber dari

<sup>3</sup> Lihat pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan dari pemerintah daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pembiayaan yang bersumber dari APBN didistribusikan secara nasional ke seluruh daerah tingkat I untuk membiayai kegiatan rutin pendidikan yang tercantum dalam Daftar Isian Kegiatan (DIK) yang sekarang disebut Daftar Isian Proyek Anggaran (DIPA). Sedangkan APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang APBD<sup>4</sup> yang di dalamnya tercakup pembiayaan berbagai sektor pembangunan di mana salah satu di antaranya adalah pendidikan.

Sumber pembiayan pendidikan berikutnya adalah masyarakat, yakni orangtua atau keluarga peserta didik. Dalam kenyataannya, bila sebuah keluarga ingin menyekolahkan anaknya ke suatu institusi pendidikan, maka mereka harus menyediakan dan mengeluarkan sejumlah dana untuk keperluan pendaftaran, uang sekolah, kegiatan ko dan ekstra kurikuler, baju seragam, sepatu, tas, buku dan alat-alat tulis, alat-alat pembelajaran dan olahraga, transportasi, uang saku, bahkan sampai biaya-biaya insidental seperti peringatan hari-hari besar nasional dan keagamaan, dan lain-lain. Semakin

<sup>4</sup> Leblh lanjut lihat Undang-Undang Nomor 22 tentang Pemerintahan Daerah.



banyak komponen yang harus dibiayai, maka akan semakin besar dana yang harus disediakan dan dikeluarkan orangtua untuk pendidikan anak-anaknya.

Biaya pendidikan yang harus disediakan dan dikeluarkan orangtua tersebut bisa meliputi biaya langsung (*direct cost*) dan biaya tidak langsung (*indirect cost*). Biaya langsung adalah seluruh biaya yang harus dibayarkan orangtua ke sekolah agar anaknya dapat mengikuti kegiatan pembelajaran. Menurut Fatah, biaya langsung ini bisa terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar anak.<sup>5</sup> Sedangkan biaya tidak langsung ialah pengeluaran yang secara tidak langsung menunjang proses pendidikan, tetapi memungkinkan proses pendidikan tersebut terjadi di sekolah, misalnya biaya hidup, biaya transportasi, biaya jajan, biaya kesehatan, dan biaya kesempatan (*opportunity cost*).<sup>6</sup>

Besarnya penerimaan pembiayaan pendidikan dari masyarakat atau orangtua, baik perorangan maupun lembaga atau yayasan, umumnya bergantung pada kemampuan masyarakat setempat dalam memajukan pendidikan. Kontribusi pembiayaan pendidikan dari masyarakat atau

<sup>5</sup> Lihat Nanag Fatah, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya), 2002, hlm. 23.

<sup>6</sup> Lihat Dedi Supriyadi, *op. cit.*, hlm. 4.

orangtua ini merupakan wujud nyata dari implementasi pasal 46 Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa pendanaan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dalam penjelasan pasal 46 tersebut dinyatakan bahwa sumber pendanaan dari masyarakat itu mencakup antara lain sumbangan pendidikan, hibah, wakaf, zakat, pembayaran nazar, pinjaman, sumbangan perusahaan, keringanan dan penghapusan pajak untuk pendidikan, dan lain-lain penerimaan yang sah.<sup>7</sup>

Sumber-sumber pembiayaan pendidikan berikutnya adalah badan-badan *funding* pendidikan, baik berasal dari dalam maupun luar negeri, yang berminat dan berkepentingan untuk pengembangan dan kemajuan pendidikan. Bentuk-bentuk bantuan pembiayaan yang diberikan badan-badan atau yayasan *funding* tersebut bisa berupa beasiswa, bantuan sarana atau alat pembelajaran, pelatihan, dan lain-lain.

Banyaknya pihak yang terlibat dalam pembiayaan pendidikan mengindikasikan kenyataan betapa besarnya komponen-komponen yang harus dibiayai dalam pelaksanaan pendidikan. Dari satu sisi, komponen pembiayaan tersebut bisa menyangkut pembiayaan rutin maupun insidental. Pembiayaan

<sup>7</sup> Lihat pasal 46 Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Penjelasan



rutin adalah pembiayaan yang menyangkut dan berpengaruh secara efektif terhadap proses pembelajaran pada suatu institusi pendidikan. Sedangkan pembiayaan insidental adalah pembiayaan yang dibutuhkan pada waktu atau kondisi tertentu untuk mendukung penyelenggaraan proses pembelajaran.

Dari sisi lain, komponen pembiayaan pendidikan bisa pula menyangkut biaya pendidikan secara keseluruhan (*total cost*) dan biaya satuan per siswa (*unit cost*). *Total cost* adalah seluruh biaya yang dibelanjakan oleh seluruh peserta didik pada satu satuan atau jenjang pendidikan tertentu untuk membiayai seluruh komponen dan kegiatan yang berkaitan dengan pendidikannya. Sedangkan *unit cost* adalah besaran biaya yang dikeluarkan per individu siswa atau santri yang dialokasikan untuk membiayai pendidikannya, baik berupa biaya langsung maupun tidak langsung. Bedanya dengan *total cost*, *unit cost* ini merupakan ukuran yang menggambarkan seberapa besar sebenarnya dana riil yang dibayarkan per siswa ke sekolah-sekolah secara efektif untuk kepentingannya dalam menempuh pendidikan.<sup>8</sup> Dengan kata lain, *unit cost* adalah besaran biaya yang dikeluarkan per siswa untuk membiayai komponen-komponen yang terkait dalam pendidikan.<sup>9</sup> Komponen-komponen dimaksud bisa berupa kompoenen rutin

dan insidental. Di antara bentuk komponen rutin yang harus dibiayai misalnya uang sekolah, pembelian buku dan alat-alat tulis, biaya ulangan umum dan ujian nasional, biaya praktikum, biaya ko dan ekstra kurikuler, uang makan, uang saku, transportasi, dan lain-lain. Sedangkan komponen insidental yang juga harus biayai misalnya uang pangkal/pendaftaran, pembelian baju seragam sekolah, baju olah raga, sepatu, tas, buku teks, uang asrama/ *mondok*, dana sosial, dana peringatan hari-hari besar nasional dan keagamaan, dana kesehatan, dan lain-lain

Besar kecilnya *unit cost* akan ditentukan oleh seberapa banyak komponen-komponen pendidikan yang harus dibiayai oleh individu siswa. Dalam tataran praktis, seluruh komponen tersebut umumnya tercantum dalam Rencana Anggaran dan Belanja Sekolah (RAPBS) yang disusun oleh suatu satuan pendidikan. RAPBS mencakup dua hal pokok, yaitu *rencana pendapatan* dan *rencana pengeluaran* atau belanja sekolah. Dalam rencana pendapatan terdapat komponen sumber dana, baik yang berasal dari pemerintah, siswa/orangtua (terutama dari iuran rutin sekolah), dan masyarakat. Sementara dalam rencana pengeluaran terdapat komponen gaji (umumnya gaji guru dan pegawai) dan non gaji (pemeliharaan, pengadaan sarana, penyelenggaraan pembelajaran, dan kegiatan ekstra kurikuler). Berdasarkan penelitian yang dilakukan Supriadi,

<sup>8</sup> Lihat Nanang Fatah, *op. cit.*, hlm. 24.

<sup>9</sup> Lihat Mintarsih Danumihardja, *op. cit.*, hlm. 7.



RAPBS ini umumnya mencerminkan kekuatan sekolah dalam membiayai pendidikannya dan sekaligus menggambarkan rata-rata status sosial ekonomi keluarga para siswa.<sup>10</sup>

Secara praktikal, ada dua pendekatan yang biasanya digunakan untuk menentukan biaya satuan atau *unit cost* siswa/santri, yaitu pendekatan makro dan mikro. Dalam konteks pendekatan makro, perhitungan pembiayaan didasarkan pada keseluruhan jumlah pengeluaran pendidikan yang diterima institusi pendidikan dari berbagai sumber dana kemudian dibagi jumlah siswa/santri. Berbeda dengan itu, pendekatan mikro mendasarkan perhitungan biaya berdasarkan alokasi pengeluaran per komponen kegiatan pendidikan yang digunakan oleh siswa/santri.

Baik pada pendekatan makro maupun mikro, dikenal beberapa kategori pembiayaan pendidikan. *Pertama*, biaya langsung (*direct cost*) dan tidak langsung (*indirect cost*) sebagaimana telah dipaparkan terdahulu. *Kedua*, biaya pribadi (*private cost*) dan biaya sosial (*social cost*). Biaya pribadi (*private cost*) adalah pengeluaran keluarga untuk pendidikan anak-anaknya atau lebih dikenal dengan istilah pengeluaran rumah tangga (*household expenditure*). Sedangkan biaya sosial (*social cost*) adalah biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk pendidikan, baik melalui sekolah ataupun pajak yang

dihimpun pemerintah, kemudian digunakan untuk membiayai pendidikan. *Ketiga*, biaya dalam bentuk uang (*monetary cost*) dan bukan uang (*non monetary cost*).

Pada umumnya, faktor utama yang menentukan perhitungan besarnya biaya pada satu satuan pendidikan adalah kebijakan dalam pengalokasian anggaran pendidikan.. Dalam tataran praktikal, kebijakan pengalokasian anggaran ini selalu disesuaikan dengan kemampuan suatu sekolah atau madrasah yang didasarkan pada besar-kecilnya penerimaan pembiayaan, baik yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, orangtua, maupun sumber-sumber pembiayaan lainnya.

Untuk menghitung besarnya biaya penyelenggaraan pendidikan pada suatu satuan atau jenjang pendidikan dapat dilakukan dengan menghitung pengeluaran total (*total cost*) dan jumlah biaya satuan (*unit cost*). Biaya total merupakan gabungan seluruh biaya per komponen input pendidikan pada setiap sekolah atau madrasah. Sedangkan satuan biaya pendidikan (*unit cost*) merupakan biaya rata-rata yang dikeluarkan untuk melaksanakan pendidikan pada sekolah atau madrasah per siswa per tahun anggaran. Satuan biaya pendidikan ini merupakan fungsi dari besarnya pengeluaran sekolah atau madrasah serta banyaknya siswa atau santri sekolah atau madrasah tersebut. Karena itu, satuan biaya (*unit*

<sup>10</sup> Lihat Dedi Supriyadi, *op. cit.*, hlm. 67.



cost) ini dapat diketahui dengan cara membagi seluruh jumlah pengeluaran sekolah/ madrasah setiap tahun dengan jumlah siswa/ santri pada tahun yang bersangkutan. Cara ini juga dapat dilakukan untuk menghitung besarnya satuan biaya yang dikeluarkan orangtua atau keluarga setiap tahunnya. Berdasarkan hal ini, maka perhitungan satuan biaya pendidikan dapat menggunakan formula sebagai berikut:

$$S_b(s,t) = f \{K(s,t) \text{ dan } M(s,t)\}$$

Keterangan:

- $S_b$  : satuan biaya persiswa/santri pertahun  
 $K$  : jumlah seluruh pengeluaran  
 $M$  : jumlah siswa/santri  
 $s$  : sekolah tertentu  
 $t$  : tahun tertentu

## B. Beberapa Studi tentang Pembiayaan Pendidikan

Studi tentang pembiayaan pendidikan sudah banyak dilakukan, baik untuk kepentingan ilmiah murni maupun untuk mengevaluasi kebijakan dalam pembiayaan pendidikan. Sebagaimana dilaporkan Supriadi<sup>11</sup>, studi-studi tersebut sangat variatif, baik dilihat dari sumber biaya yang dikaji maupun dari metode yang digunakan.

<sup>11</sup> Lihat Dedi Supriadi, *ibid.*, hlm. 37.

Mochammad Idochi Anwar telah melakukan studi untuk meneliti transformasi biaya pendidikan dalam layanan pendidikan pada level perguruan tinggi dengan mengambil lokasi di Bandung, Jawa Barat. Berdasarkan studi tersebut diketahui bahwa meskipun biaya pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi di Bandung menunjukkan kenaikan yang signifikan dari tahun ke tahun, namun kenaikan tersebut belum mempunyai dampak yang berarti terhadap peningkatan kualitas pelayanan dalam kegiatan belajar mengajar (KBM). Di antara penyebabnya adalah, meskipun secara nominal biaya pendidikan bertambah besar, namun nilai nominal atau daya beli mata uang menurun.<sup>12</sup>

Persoalan tentang biaya pendidikan pada tingkat satuan pendidikan dasar, yaitu Sekolah Dasar Negeri di kota Pekanbaru, pernah diteliti Wagiman pada tahun 1992. Penelitian ini menemukan bahwa perencanaan anggaran belum sinkron dengan prioritas alokasi anggaran guna menunjang peningkatan mutu atau kualitas program pengajaran. Penyebabnya adalah *unit cost* yang lebih kecil bila dibanding dengan kebutuhan SD

<sup>12</sup> Elaborasi lebih lanjut lihat Moch. Idoci Anwar, *Transformasi Biaya Pendidikan dalam Layanan Pendidikan pada Perguruan Tinggi Rimbuto (Rimbuto, PPs IKIP Rimbuto), 1990.*



Negeri dan kekurangmampuan sekolah dalam memanfaatkan dana untuk menunjang kegiatan pembelajaran.<sup>13</sup>

Pada tahun 1993, *World Bank*<sup>14</sup> dan Ditjen PUOD<sup>15</sup> melakukan studi tentang satuan biaya pendidikan. Hasil studi kedua lembaga ini menemukan bahwa kontribusi masyarakat terhadap pendidikan berkorelasi dengan status sosial ekonomi masyarakat pada suatu daerah. Besaran penerimaan biaya pendidikan yang bersumber dari masyarakat atau orangtua siswa mencerminkan kemampuan ekonomi masyarakat. Karena itu, berdasar studi tersebut, disimpulkan bahwa biaya pendidikan merupakan fungsi dari struktur ekonomi masyarakat di suatu daerah.

Pada tahun 1995, Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan juga telah melakukan penelitian tentang pembiayaan pendidikan. Berdasar studi tersebut diketahui bahwa: (1) meskipun pendidikan dasar mengalami pertumbuhan yang relatif cepat,

<sup>13</sup> Lihat Wagiman, *Pengelolaan Biaya Pendidikan dalam Menunjang Pelaksanaan Program Pengajaran di SD Negeri (studi Deskriptif tentang Pengelolaan Biaya Pendidikan di SD Negeri dalam Kodya Pekan Baru)*, Penelitian Tesis (Bandung: PPs IKIP Bandung), 1993.

<sup>14</sup> Lihat World Bank, *Indonesia: Public Expenditures, Prices, and the Poor* (Washington DC: East Asia and Pacific Regional Office, Country Departemen III), 1993.

<sup>15</sup> Lihat Ditjen PUOD, *Penelitian dan Pengkajian Satuan Biaya Sekolah Dasar* (Jakarta: Ditjen PUOD Departemen Dalam Negeri), 1993.

namun tingkat efisiensi internal masih relatif rendah. Hal tersebut ditunjukkan oleh semakin tingginya angka putus sekolah dan tingal kelas, (2) sekitar 73,7% angkatan kerja Indonesia masih berpendidikan SD atau lebih rendah, karena tidak tamat SD dan tidak sempat sekolah, (3) pemerataan dan akses antara berbagai strata sosial ekonomi menunjukkan bahwa terdapat ketimpangan akses antara murid yang berasal dari keluarga berpendapatan tinggi dengan keluarga yang berpendapatan rendah. Kemudian, terdapat kecenderungan kuat bahwa anak-anak yang berdomisili di perkotaan memperoleh manfaat yang lebih besar dari subsidi pendidikan yang diberikan oleh pemerintah, dan (4) anggaran atau biaya pendidikan SD Negeri sebahagian besar atau 92,39% masih bergantung pada pemerintah pusat. Sedangkan peran orangtua dalam menanggung seluruh beban biaya pendidikan SD masih relatif rendah atau 6,98%. Selain itu, kontribusi sumber pembiayaan lainnya, seperti APBD, BP3, dan dunia usaha juga masih rendah.

Studi tentang pembiayaan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan dasar dengan mengambil lokasi di Jawa Barat juga telah dilakukan oleh Nanang Fatah. Studi tersebut menyimpulkan bahwa pembiayaan memiliki kontribusi yang signifikan terhadap mutu pendidikan SD di Jawa Barat. Secara spesifik, penelitian ini juga menemukan bahwa pembiayaan



berkorelasi secara signifikan dengan PBM dan kualitas hasil belajar peserta didik.<sup>16</sup>

Masih pada lokasi di Jawa Barat, yaitu Cirebon, Mintarsih Danumihardja melakukan penelitian tentang manajemen keuangan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) negeri dan swasta dengan fokus studi pada keterkaitan level biaya dengan mutu lulusan. Studi ini menemukan bahwa SLTP yang memiliki biaya pendidikan yang lebih tinggi terbukti mampu mengelola PBM yang lebih baik dibanding SLTP yang sebaliknya. Sedangkan kualitas PBM yang lebih baik lebih mampu menghasilkan *out put* atau lulusan yang lebih berkualitas.<sup>17</sup>

Masalah pendanaan pendidikan di Indonesia juga telah menjadi salah satu studi dan bahasan kelompok kerja reformasi pendidikan dalam konteks otonomi daerah yang pelaksanaannya diprakarsai oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bank Dunia (*World Bank*), dan Departemen Pendidikan Nasional.<sup>18</sup> Selain temu

<sup>16</sup> Lihat dalam Nanang Fatah, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya), 2002.

<sup>17</sup> Lihat Mintarsih Danumihardja, *Manajemen Keuangan Sekolah (Studi manajemen Keuangan SLTP dalam Implementasi otonomi Daerah)* (Jakarta: Uhamka Press), 2004.

<sup>18</sup> Lebih lanjut lihat 'Pendanaan Pendidikan di Indonesia dalam Dedi Supriadi dan Fasli Jalal (ed.), *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah* (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa), 2001, hlm. 413-438.

pakar dan praktisi pendidikan, kelompok kerja ini juga melakukan studi kasus di tiga propinsi, yaitu Sumatera Barat, Jawa Barat, dan Kalimantan Barat. Berdasar hasil studi dan bahasan yang dilakukan, kelompok kerja reformasi pendidikan ini berkesimpulan bahwa proporsi anggaran pemerintah untuk pendidikan masih tergolong rendah. Dari total anggaran, proporsi anggaran pendidikan nasional yang bersumber dari pemerintah pusat hanya sekitar 5-8%. Kelompok kerja juga menemukan bahwa penyedia utama pendidikan di Indonesia adalah Departemen Pendidikan Nasional yang diikuti oleh Departemen Agama sebagai penyedia utama kedua. Sumber penerimaan sekolah negeri adalah anggaran rutin (DIK) dan anggaran pembangunan (DIP). Pada tingkat SD, masih terdapat sumber lain, yaitu INPRES SD dan subsidi untuk sekolah dasar, yakni Subsidi Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan (SBPP).<sup>19</sup>

Kelompok kerja juga menemukan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin besar alokasi dana pemerintah per siswa/mahasiswa. Pada tingkat SD, rata-rata alokasi dana per siswa sebesar Rp. 221.000,-, SLTP sebesar Rp. 337.000,-,

<sup>19</sup> Saat ini, ada terminologi untuk menyebutkan biaya serupa, yaitu dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) yang diberikan kepada seluruh satuan pendidikan dasar (SD/MI) sebagai kompensasi kenaikan harga BBM untuk pembiayaan pendidikan.



SMU sebesar Rp. 721.000, SMK sebesar Rp. 894.000,- dan pendidikan tinggi sebesar Rp. 1.600.000,-.

Kelompok kerja juga menemukan bahwa lebih dari 80% alokasi dana pemerintah dikeluarkan untuk membayar gaji guru pada jenjang SD dan SLTP. Total anggaran pembangunan untuk pendidikan dasar, termasuk INPRES SD, hanya sebesar 15% dari total alokasi anggaran. Kemudian ditemukan pula bahwa rata-rata anggaran per siswa pada sekolah negeri lebih tinggi dibanding sekolah swasta. Alokasi pemerintah pusat adalah sumber penerimaan terbesar, baik di SD negeri maupun swasta. Sedangkan pada sekolah menengah, keluarga atau yayasan merupakan penyumbang utama penerimaan sekolah, berkisar antara 66-86% dari total penerimaan sekolah.

Studi terbaru tentang satuan biaya pendidikan tingkat dasar dan menengah adalah penelitian yang dilakukan Dedi Supriadi.<sup>20</sup> Penelitian tersebut dilakukan pada 6 (enam) propinsi, yaitu Sumatera Utara, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan Kalimantan Barat. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa peranan pemerintah sangat menonjol dalam pembiayaan pendidikan di sekolah negeri, yaitu 83% di tingkat SD, 81% di tingkat SLTP, 78% di tingkat SMU, dan 79% di tingkat SMK. Sekitar 95-99% dana

pemerintah tersebut digunakan untuk membayar gaji guru dan pegawai. Namun bila dihitung dari total biaya per siswa yang memungkinkan mereka dapat mengikuti proses pendidikan di sekolah, peran pemerintah dalam pembiayaan pendidikan ternyata hanya meliputi 19-30%, masyarakat (selain orangtua) hanya memberikan kontribusi sebesar 1-4%. Karena itu, melalui penelitian ini diketahui bahwa kontribusi terbesar dalam pembiayaan pendidikan sebenarnya ditanggung orangtua atau keluarga, yaitu sebesar 68-80%. Begitupun, jumlah ini belum termasuk biaya kesempatan (*opportunity cost*), yaitu hilangnya kesempatan anak untuk memperoleh pendapatan atau melakukan hal-hal yang produktif dan berguna bagi keluarganya (misalnya membantu orangtua) karena mereka bersekolah. Melalui penelitian tersebut juga ditemukan ternyata dana yang dibayarkan langsung oleh orangtua ke sekolah hanya 25% untuk tingkat SD dan SLTP, 24% untuk tingkat SMU, dan 34% untuk tingkat SMK. Selebihnya, dana tersebut dibelanjakan langsung oleh para siswa tanpa melalui sekolah.

<sup>20</sup> Lihat Dedi Supriyadi, *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah* (Bandung: Remaja Rosdakarya), 2003.



### BAB III

## UNIT COST SANTRI MADRASAH TSANAWIYAH PONDOK PESANTREN SUMATERA UTARA

### A. Sumber Dana MTs Pondok Pesantren

Dari manakah sumber-sumber dana untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah Tsanawiyah (MTs) pondok pesantren di Sumatera Utara? Studi ini menemukan bahwa sumber pembiayaan tersebut berasal dari 5 (lima) sumber, yaitu: (1) pemerintah, (2) orangtua atau keluarga santri, (3) yayasan, (4) *infaq* atau *waqaf* masyarakat, dan (5) usaha pondok pesantren. Temuan penelitian ini memberikan gambaran bahwa sumber-sumber pembiayaan pendidikan pada MTs pondok pesantren berbeda dengan lembaga pendidikan persekolahan yang umumnya *difunding* oleh pemerintah dan orangtua peserta didik..

Pada seluruh pesantren yang distudi, ditemukan bahwa sumber dana yang berasal dari pemerintah umumnya diperoleh melalui bantuan Biaya Operasional Sekolah (BOS). Berdasarkan wawancara dengan para pimpinan MTs pondok pesantren dan sumber tertulis sebagaimana tertera dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pondok Pesantren (RAPBPP) diketahui bahwa bantuan pembiayaan dari pemerintah melalui dana BOS

baru kurang lebih dua tahun belakangan ini diterima pondok pesantren. Itu artinya, pada masa-masa sebelumnya dapat dikemukakan bahwa belum ada kontribusi riil pemerintah dalam membiayai penyelenggaraan pendidikan pondok pesantren, kecuali bantuan yang bersifat insidentil dan sangat terbatas.

Penelitian ini menemukan bahwa sudah sejak lama pondok pesantren banyak memanfaatkan sumber pembiayaan dari orangtua atau keluarga santri. Pada umumnya, dana yang berasal dari orangtua atau keluarga santri seluruhnya diperoleh MTs pondok pesantren melalui Sumbangan Pembiayaan Pendidikan (SPP) dan biaya konsumsi atau makan-minum santri yang disetorkan ke pondok pesantren.

Selain dari orangtua dan pemerintah, MTs pondok pesantren juga memiliki sumber pembiayaan yang berasal dari yayasan. Pada umumnya, pengurus yayasan pondok pesantren adalah merupakan keturunan atau kerabat kyai. Selain itu, gejala umum juga memperlihatkan bahwa dalam realitasnya, yayasan umumnya memberikan 'suntikan' dana ke MTs pondok pesantren hanya untuk membantu menanggulangi kekurangan pembiayaan operasional, baik untuk keperluan gaji maupun non gaji. Meskipun pondok pesantren Hidayatullah kabupaten Deli Serdang dapat disebut sebagai pengecualian, umumnya yayasan pondok pesantren lain yang diteliti memperlihatkan fenomena yang sama.



Sumber pembiayaan MTs pondok pesantren berikutnya adalah *infaq* atau *waqaf* masyarakat. Bila menermati historika pondok pesantren di Indonesia, sebenarnya *infaq* atau *waqaf* bukan saja merupakan modal awal, tetapi juga sumber-sumber yang turut menjamin kontinuitas dan perkembangan pendidikan pada pondok pesantren. Dalam berbagai kasus, kehadiran sebuah pondok pesantren seringkali dibangun di atas tanah *waqaf* penduduk setempat dan *infaq* merupakan sumber *funding* yang menghidupi pesantren dengan berbagai aktivitas pendidikannya. Dalam studi ini, peneliti menemukan bahwa sumber dana yang berasal dari *infaq* atau *waqaf* diperoleh pesantren dari masyarakat atau donatur perorangan, baik dalam bentuk uang tunai (*cash money*) maupun bantuan pengadaan sarana dan fasilitas pendidikan, seperti pembangunan masjid, pengadaan ruang perpustakaan, ruang belajar, asrama atau pondokan, pembangunan jalan pesantren, dan lain-lain.

Akhirnya, pembiayaan pondok pesantren juga tidak terlepas dari usaha mandiri yang dirintis dan dikembangkan pondok pesantren. Dalam konteks pondok pesantren Sumatera Utara, studi ini menemukan bahwa jenis atau ragam usaha pondok pesantren umumnya terdiri dari usaha koperasi, perkebunan, peternakan, perbengkelan, dan lain-lain.

Secara umum dapat dikemukakan bahwa besar-kecilnya dana yang diperoleh dari seluruh sumber di atas, disamping bergantung pada besar-kecilnya uang SPP, juga sangat bergantung pada besar-kecilnya jumlah santri yang belajar pada MTs pesantren yang bersangkutan. Sebagai contoh, pondok pesantren Musthafawiyah yang jumlah santrinya mencapai 6000 orang, memperoleh dana BOS lebih besar bila dibanding pesantren lain yang ada di Sumatera Utara. Demikian juga, pondok pesantren Darul Arafah di kabupaten Deli Serdang dan Raudhatul Hasanah di kota Medan memperoleh dana SPP dan konsumsi yang lebih besar dibanding pesantren lain dikarenakan jumlah santri yang belajar pada kedua pesantren tersebut jumlahnya memang lebih besar.

Dari seluruh pondok pesantren yang distudi, kecuali kabupaten Madina, sumber pembiayaan terbesar MTs pondok pesantren Sumatera Utara umumnya diperoleh dari orangtua atau keluarga santri melalui dana Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), kemudian pemerintah melalui dana BOS, usaha pondok pesantren, yayasan, dan *waqaf*. Dalam kasus Madina, sumber pembiayaan terbesar diperoleh MTs pondok pesantren dari pemerintah melalui dana BOS. Dari 14 pondok pesantren yang distudi, hanya pondok pesantren di kabupaten Deli Serdang, Simalungun dan Labuhan Batu yang memperoleh sumber pembiayaan dari yayasan dan *infaq* atau *waqaf* masyarakat.



Sementara itu, dari seluruh pesantren, hanya pondok pesantren Ulumul Qur'an di kabupaten Langkat yang menerima kucuran dana tetap setiap tahun dari pemerintah kabupaten (Pemkab).

Berdasar penelitian yang dilakukan, kecuali MTs pondok pesantren kota Medan, umumnya lokasi MTs pondok pesantren tidak memiliki keterkaitan yang signifikan dengan besaran dana yang diperoleh pondok pesantren. Artinya, untuk wilayah tingkat dua Sumatera Utara, lokasi pesantren kota-piggir kota tidak memiliki keterkaitan dengan besaran dana yang berhasil diperoleh dari sumber-sumber yang tersedia. Dalam konteks besaran dana, dalam tabel 6 dapat diketahui bahwa MTs pondok pesantren kota Medan menempati urutan pertama dalam hal besaran pendapatan yang berhasil diperoleh dari seluruh sumber pembiayaan, yaitu sebesar Rp. 3.440.810.000,-. Posisi tersebut secara berturut-turut ditempati oleh MTs pondok pesantren Deli Serdang (Rp. 2.508.370.000,-), Labuhan Batu (Rp. 1.032.470.000,-), Langkat kota (Rp. 778.166.867,-), Tapanuli Selatan (Rp. 755.750.000,-), Madina (Rp. 727.305.500,-), Langkat pinggir kota (Rp. 411.565.000,-), dan akhirnya Simalungun (Rp. 230.692.000,-). Secara rinci jumlah pendapatan MTs pondok pesantren dari seluruh sumber pendanaan tersebut bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7: Sumber-Sumber Pembiayaan MTs Pondok Pesantren Sumatera Utara (pertahun)

No	Sumber Dana	Medan	Deli Serdang		Langkat	
		Kota	Pinggir	Kota	Pinggir	
1	Pemerintah melalui BOS	318.500.000.-	21.870.000.-	53.866.867.-	13.365.000.-	
2	Pemko/Pemda	-	-	12.500.000.-	-	
3	Dana Komite melalui SPP/Konsumsi	3.038.310.000.-	2.308.500.000.-	676.200.000.-	376.200.000.-	
4	Yayasan	-	-	-	10.000.000.-	
5	Infag/Wakat/Donatur	-	-	-	-	
6	Usaha Pesantren	84.000.000.-	-	3.600.000.-	-	
	1.Koperasi		112.000.000.-	24.000.000.-	12.000.000.-	
	2. Perkebunan		66.000.000.-	8.000.000.-	-	
	3.Peternakan		-	-	-	
4. lain-lain		-	-	-	-	
Jumlah		3.440.810.000.-	2.508.370.000.-	778.166.867.-	411.565.000.-	
No	Sumber Dana	Simalungun	Madina	Labuhan Batu	Tapanuli Selatan	
		Pinggir	Pinggir	Pinggir	Pinggir	
1	Pemerintah melalui BOS	10.192.000.-	418.280.500.-	98.670.000.-	64.350.000.-	
2	Pemko/Pemda	-	-	-	-	
3	Dana Komite melalui SPP/Konsumsi	165.600.000.-	301.125.000.-	897.000.000.-	691.400.000.-	
4	Yayasan	21.500.000.-	-	5.000.000.	-	
5	Infag/Wakat/Donatur	6.000.000.-	-	-	-	
6	Usaha Pesantren	2.400.000.- 25.000.000.- -	7.900.000.-	1.800.000.-	-	
	2. Perkebunan		-	30.000.000.-	-	
	3.Peternakan		-	-	-	
Jumlah		230.692.000.-	727.305.500.-	1.032.470.000.-	755.750.000.-	



Dari seluruh sampel studi, tiga MTs pondok pesantren tidak memiliki usaha mandiri, yaitu pondok pesantren Babussalam Tanjung Pura di kabupaten Langkat, pondok pesantren Al-Mukhtariyah Sungai Dua, dan pondok pesantren Purbangal Sosopan di kabupaten Tapanuli Selatan. Sedangkan sebelas MTs pondok pesantren lainnya, masing-masing memiliki usaha mandiri yang turut memberikan konstibusi bai membantu pembiayaan pendidikan MTs. Secara spesifik, jenis usaha dan besaran dana yang diperoleh dari usaha mandiri masing-masing MTs pondok pesantren dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8: Jenis dan penghasilan usaha mandiri pondok pesantren

Kabupaten Kota		Jenis Usaha dan Penghasilan (Rp)			
		Koperasi	Perkebunn	Peternakn	Lain-lain
Medan	Al-Kautsar	20.000.000	-	-	-
	Raudhah Hasanah	64.000.000	-	-	-
Deli Serdang	Hidayatu Ilah	-	1.800.000	2.400.000	-
	Darul Arafah	-	112.000.000	-	75.000.000
Langkat	Ulumul Qur'an	3.600.000	24.000.000	-	8.000.000
Simalu- ngun	Darul Arqam	180.000	2.100.000		
	Luqman	3.000.000	2.000.000		
Madina	Musthafawiyah	15.000.000	-	-	-
	Darul Ikhlas	4.000.000	-	2.000.000	
Labuh- an Batu	Ahmadul Jariah		30.000.000		
	Al-Makshum	1.800.000	-	-	

## B. Pengeluaran/ Belanja Rutin MTs Pondok Pesantren

Secara umum, jenis atau ragam pengeluaran seluruh MTs pondok pesantren meliputi dua komponen pokok, yaitu: (1) gaji dan, (2) non gaji. Namun bila diurai secara rinci, pengeluaran non gaji ternyata mencakup tujuh komponen pengeluaran atau belanja rutin yang terdiri dari: (1) belanja ATK, (2) langganan daya dan jasa, seperti listrik, air, telepon, dan koran, (3) kegiatan belajar mengajar dan penyelenggaraan ujian, (4) pemeliharaan dan perawatan gedung atau sarana, (5) pembinaan dan peningkatan kualitas guru, (6) konsumsi santri dan guru, dan (7) pengeluaran lain-lain, seperti untuk biaya porseni, kegiatan ekstra kurikuler, dan insentif guru. Dengan demikian, bila digabung dengan gaji, maka ragam komponen belanja rutin MTs pondok pesantren Sumatera Utara meliputi delapan komponen belanja atau pengeluaran.

Dari delapan komponen di atas, ada dua komponen utama yang menyedot dana terbesar yang harus dibiayai MTs pondok pesantren, yaitu gaji dan konsumsi santri/guru. Dalam konteks ini, seluruh MTs pondok pesantren terbagi ke dalam dua kelompok. *Pertama*, pada pondok pesantren kota Medan, Deli Serdang, dan Langkat, komponen pembiayaan terbesar pertama yang harus dibiayai adalah konsumsi santri/guru yang diikuti berturut-turut oleh gaji, biaya kegiatan belajar mengajar (KBM), dan komponen



lainnya. *Kedua*, pada pondok pesantren kabupaten Simalungun, Labuhan Batu, Tapanuli Selatan, dan Madina, komponen pembiayaan terbesar yang menempati posisi pertama adalah gaji yang diikuti secara berturut-turut oleh konsumsi santri/guru, biaya KBM dan penyelenggaraan ujian, dan komponen lainnya. Perbedaan ini tampaknya berkaitan erat dengan lokasi pondok pesantren. Medan merupakan kota besar dan sekaligus ibukota propinsi Sumatera Utara. Sedangkan Langkat dan Deli Serdang merupakan dua kabupaten yang berdekatan dan pintu gerbang memasuki kota Medan. Pada ketiga wilayah ini, biaya hidup relatif lebih tinggi bila dibanding dengan kabupaten lainnya yang terletak jauh dari ibukota propinsi Sumatera Utara, Medan. Tingginya biaya hidup tersebut disebabkan harga bahan-bahan kebutuhan pokok konsumsi yang memang relatif lebih tinggi bila dibanding dengan kabupaten Simalungun, Labuhan Batu, Tapanuli Selatan, dan Madina. Rician belanja MTs pondok pesantren Sumatera Utara untuk komponen gaji dan konsumsi per tahun dapat dilihat pada tabel 9.

Tabel 9: Belanja atau Pengeluaran MTs pondok pesantren untuk komponen gaji dan konsumsi/ tahun

No	Kabupaten/Kota	Komponen dan Jumlah Pengeluaran/ Pembiayaan (Rp)	
		Gaji	Konsumsi
1.	Medan	769.935.000,-	1.983.470.000,-
2.	Deli Serdang	448.000.000,-	1.822.500.000,-
3.	Langkat: kota pgr. kota	141.685.200,-	502.320.000,-
		112.608.000,-	236.600.000,-
4.	Simalungun	90.144.800,-	86.800.000,-
5.	Labuhan Batu	440.500.000,-	321.000.000,-
6.	Tapanuli Selatan	325.100.000,-	215.000.000,-
7.	Mandailing Natal	493.100.000,-	-

Dari tabel di atas tampak bahwa MTs pondok pesantren di kabupaten Mandailing Natal tidak mengeluarkan dana untuk membiaya konsumsi santri dan guru. Berbeda dengan pondok pesantren lain dimana para santri membayarkan biaya konsumsinya ke pesantren, pada pondok pesantren Musthafawiyah dan Ma'had Darul Ikhlas kabupaten Madina, seluruh santri membiayai konsumsi makan-minum mereka secara mandiri. Artinya, pondok pesantren tidak memberikan pelayanan dapur umum atau mengutip biaya untuk keperluan makan-minum harian santri. Karenanya,



pada kedua pondok pesantren *salafiyah* ini, seluruh santri ada yang memasak sendiri, ada yang membayar makan atau berlangganan ke warung, dan ada pula sebahagian lain yang makan dengan cara membayar langsung ke warung setiap kali mereka makan. Kondisi ini merupakan salah satu ciri khas pesantren *salafiyah* yang dapat membedakannya dengan pesantren *khalafiyah*.

Berdasarkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pondok Pesantren (RAPBPP), setelah komponen konsumsi dan gaji, KBM merupakan komponen pembiayaan peringkat ketiga terbesar yang harus didanai MTs pondok pesantren. Dalam konteks ini, pondok pesantren kabupaten Labuhan Batu menempati posisi pertama dengan nominal belanja sebesar Rp. 157.000.000,-, diikuti berturut-turut oleh kota Medan sebesar Rp. 131.000.000,-, kabupaten Tapanuli Selatan sebesar Rp. 111.000.000,-, kabupaten Madina sebesar Rp. 103.000.000,-, kabupaten Deli Serdang sebesar Rp. 69.850.000,-, kabupaten Langkat sebesar Rp. 57.302.000,- (kota) dan Rp. 29.895.000,- (pinggir kota), dan kabupaten Simalungun dengan belanja sebesar Rp. 17.248.000,-.

Tabel 10: Pengeluaran MTs Pondok Pesantren untuk KBM/ tahun

Peringkat	Kabupaten/Kota	Jumlah Pengeluaran/ Pembiayaan
1	Labuhan Batu	Rp. 157.000.000,-
2	Medan	Rp. 131.000.000,-
3	Tapanuli Selatan	Rp. 111.000.000,-
4	Mandailing Natal	Rp. 103.000.000,-
5	Deli Serdang	Rp. 69.850.000,-
6	Langkat: kota Pgr. kota	Rp. 57.302.000,- 29.895.000,-
7	Simalungun	Rp. 17.248.000,-

Belanja terbesar berikutnya yang didanai MTs pondok pesantren Sumatera Utara adalah insentif guru dan langganan daya dan jasa. Dalam hal insentif guru, pondok pesantren *salafiyah* di kabupaten Madina menempati urutan pertama terbesar diikuti berturut-turut oleh MTs pondok pesantren kota Medan, kabupaten Tapanuli Selatan, Deli Serdang dan Labuhan Batu, Langkat, dan akhirnya Simalungun. Berbeda dengan itu, dalam hal belanja langganan daya dan jasa, peringkat pertama ditempati MTs pondok pesantren kota Medan diikuti berturut-turut oleh MTs pondok pesantren kabupaten Madina, Tapanuli Selatan, Deli Serdang, Langkat kota, Labuhan Batu, Simalungun, dan akhirnya Langkat



pinggir kota. Secara rinci mengenai besaran pengeluaran MTs pondok pesantren untuk insentif guru dan langganan daya dan jasa ini dapat dilihat pada tabel 11.

Tabel 11: Pengeluaran untuk insentif guru dan langganan daya dan jasa

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Pengeluaran (Rp)		No
		Insentif guru	Langganan daya & jasa	
1.	Mandailing Natal	40.000.000,-	18.320.000,-	2
2.	Medan	22.500.000,-	58.900.000,-	1
3.	Tapanuli Selatan	20.000.000,-	17.200.000,-	3
4.	Deli Serdang	15.000.000,-	16.000.000,-	4
4.	Labuhan Batu	15.000.000,-	11.580.000,-	6
6.	Langkat: kota	7.800.000,-	11.820.000,-	5
	pgr. Kota	6.000.000,-	6.920.000,-	8
7	Simalungun	4.200.000,-	8.100.000,-	7

Berdasarkan RAPBPP diketahui pula bahwa belanja MTs pondok pesantren untuk membiayai Porseni dan kegiatan ekstra kurikuler dalam setahun berkisar antara Rp. 6.000.000,- sampai Rp. 25.000.000,-. Dalam hal ini, pondok pesantren kabupaten Tapanuli Selatan menempati urutan pertama diikuti berturut-turut oleh Tapanuli Selatan, Medan, Deli Serdang, Langkat Simalungun, dan

Labuhan Batu. Secara rinci mengenai hal ini adalah sebagaimana tertera pada tabel 12.

Tabel 12: Pengeluaran MTs pondok pesantren untuk porseni dan kegiatan ekstra kurikuler/ tahun

Peringkat	Kabupaten/Kota	Jumlah Pengeluaran/ Pembiayaan
1	Mandailing Natal	Rp. 25.500.000,-
2	Tapanuli Selatan	Rp. 20.000.000,-
3	Medan	Rp. 16.500.000,-
4	Deli Serdang	Rp. 10.000.000,-
5	Langkat: kota pgr. kota	Rp. 8.000.000,- 6.800.000,-
6	Simalungun	Rp. 6.500.000,-
7	Labuhan Batu	Rp. 6.000.000,-

Sumber Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pondok Pesantren (RAPBPP) juga memperlihatkan bahwa besaran pengeluaran MTs pondok pesantren untuk komponen pembiayaan pembinaan dan peningkatan kualitas guru dapat dikatakan masih tergolong rendah, bahkan pada MTs pondok pesantren kota Medan dan kabupaten Labuhan Batu, berada di bawah komponen belanja ATK. Dari seluruh sampel studi, MTs pondok pesantren kota Medan, kabupaten Madina, Tapanuli Selatan, dan Deli Serdang



adalah wilayah dimana pesantrennya mengalokasikan dana antara Rp. 10.000.000,- sampai Rp. 15.000.000,- per tahun untuk mendanai pembinaan dan peningkatan kualitas guru. Sedangkan MTs pondok pesantren di kabupaten Langkat, Labuhan Batu, dan Simalungun, mereka rata-rata hanya mengeluarkan dana antara Rp. 3.000.000,- sampai Rp. 7.500.000 per tahun untuk mendanai pembinaan dan peningkatan kualitas guru. Secara rinci, jumlah pengeluaran MTs pondok pesantren untuk membiayai komponen pembinaan dan peningkatan kualitas guru sebagaimana tertera pada tabel 13 berikut:

Tabel 13: Pengeluaran MTs pondok pesantren untuk pembinaan dan peningkatan kualitas guru

Peringkat	Kabupaten/Kota	Jumlah Pengeluaran/ Pembiayaan
1	Medan	Rp. 15.500.000,-
2	Mandailing Natal	Rp. 12.000.000,-
3	Tapanuli Selatan	Rp. 10.000.000,-
3	Deli Serdang	Rp. 10.000.000,-
4	Langkat: kota	Rp. 7.800.000,-
5	Labuhan Batu	Rp. 7.500.000,-
6	Langkat pgr kota	Rp. 6.000.000,-
7	Simalungun	Rp. 4.000.000,-

Berkaitan dengan peralatan atau alat tulis kantor (ATK), hanya dua MTs pondok pesantren yang pengeluarannya berada di atas sepuluh juta dalam setahun. Sedangkan MTs pondok pesantren lainnya, belanja ATK berkisar antara dua juta sampai lima juta rupiah pertahun. Dalam hal belanja ATK ini, MTs pondok pesantren kota Medan menempati posisi pertama tertinggi yang kemudian diikuti berturut-turut oleh MTs pondok pesantren kabupaten Labuhan Batu, Deli Serdang, Tapanuli Selatan, Madina, Langkat, dan Simalungun (lihat tabel 14).

Tabel 14: Pengeluaran MTs pondok pesantren untuk belanja ATK

Peringkat	Kabupaten/Kota	Jumlah Pengeluaran/ Pembiayaan
1	Medan	Rp. 16.500.000,-
2	Labuhan Batu	Rp. 14.040.000,-
3	Deli Serdang	Rp. 5.760.000,-
4	Tapanuli Selatan	Rp. 4.125.000,-
5	Mandailing Natal	Rp. 3.500.000,-
6	Langkat: kota pgr. kota	Rp. 2.800.000,- 2.500.000,-
7	Simalungun	Rp. 2.000.000,-

Komponen lain yang dibiayai MTs pondok pesantren setiap tahunnya adalah belanja pemeliharaan dan perawatan gedung dan



sarana atau fasilitas. Untuk komponen ini, rata-rata MTs pondok pesantren menghabiskan dana antara Rp. 2.000.000,- terendah sampai Rp. 12.500.000,- tertinggi setiap tahunnya. Belanja tertinggi ditempati oleh MTs pondok pesantren kota Medan dan terendah MTs pondok pesantren kabupaten Langkat. Rincian mengenai belanja komponen ini dapat dilihat pada tabel 15.

Tabel 15: Pengeluaran MTs pondok pesantren untuk pemeliharaan dan perawatan gedung dan sarana

Peringkat	Kabupaten/Kota	Jumlah Pengeluaran/ Pembiayaan
1	Medan	Rp. 12.500.000,-
2	Tapanuli Selatan	Rp. 9.000.000,-
3	Deli Serdang	Rp. 8.000.000,-
4	Labuhan Batu	Rp. 8.000.000,-
5	Mandailing Natal	Rp. 6.200.000,-
6	Simalungun	Rp. 2.500.000,-
7	Langkat: - kota	Rp. 2.460.000,-
	- pgr. kota	Rp. 2.000.000,-

### C. Pengeluaran atau Belanja Orangtua Santri MTs Pondok Pesantren

#### 1. Pengeluaran Orangtua Santri Pada Awal Tahun Ajaran

Ada dua komponen terbesar yang harus dibiayai orangtua atau keluarga santri ketika awal tahun anaknya mendaftar atau masuk ke MTs pondok pesantren, yaitu: (1) uang pangkal atau uang bangunan, dan (2) biaya konsumsi makan-minum santri. Bagi orangtua yang mendaftarkan anaknya ke MTs pondok pesantren kota Medan, kabupaten Deli Serdang, Langkat, dan Simalungun, uang pangkal merupakan komponen pengeluaran terbesar yang harus mereka bayar. Setelah itu, komponen berikutnya adalah belanja pakaian seragam dan ibadah, pembelian buku pelajaran atau kitab, konsumsi santri, uang saku, alat pembelajaran, dan komponen lainnya. Sementara itu, bagi para orangtua yang mendaftarkan anaknya ke MTs pondok pesantren kabupaten Labuhan Batu dan Tapanuli Selatan, komponen terbesar pertama yang harus mereka biayai adalah menyangkut konsumsi atau makan-minum santri. Setelah itu, komponen berikutnya secara berturut-turut adalah belanja pakaian seragam, ibadah, dan olah raga, pembelian kitab atau buku pelajaran, uang pangkal, sewa pondokan santri, uang saku, dan komponen lainnya.



Dapat dikemukakan bahwa awal tahun ajaran merupakan masa dimana para orangtua santri harus mengeluarkan dana dalam jumlah yang besar untuk membiayai pendidikan anaknya di MTs pondok pesantren. Berdasar data yang diperoleh dari lapangan, diketahui bahwa ada dua puluh dua komponen belanja yang harus dibiayai orangtua pada awal tahun ajaran ketika anaknya mendaftar ke MTs pondok pesantren Sumatera Utara. Ragam komponen dan besaran biaya yang harus dibelanjakan orangtua ini dapat menggambarkan betapa besarnya kontribusi orangtua dalam membiayai pendidikan pada MTs pondok pesantren. Meskipun tidak seluruh komponen berlaku untuk semua MTs pondok pesantren, data sebagaimana tertera pada tabel 15 bisa memberikan gambaran objektif tentang banyaknya jenis atau komponen belanja yang dibiayai orangtua atau keluarga santri pada setiap awal tahun ajaran.

Dari seluruh sampel yang distudi, pondok pesantren kota Medan menempati rangking pertama dengan rata-rata total biaya sebesar Rp. 3.383.000,- yang harus dikeluarkan orangtua santri pada awal tahun ajaran ketika anaknya masuk MTs pondok pesantren. Posisi tersebut berturut-turut diikuti oleh pondok pesantren kabupaten Deli Serdang sebesar Rp. 2.084.500,-, Labuhan Batu sebesar Rp. 1.520.000,-, Langkat sebesar Rp.

1.417.000,- (kota) dan Rp. 1.241.500,- (pinggir kota), Tapanuli Selatan sebesar Rp. 1.282.500,-, dan posisi terakhir ditempati kabupaten Simalungun dengan biaya sebesar Rp. 1.213.000,-.

Dari seluruh ragam belanja yang harus dibiayai orangtua santri pada awal tahun ajaran tersebut, komponen terbesar ditempati oleh uang pangkal, konsumsi santri, belanja pakaian seragam, pakaian ibadah, dan pakaian olahraga, pembelian kitab atau buku pembelajaran, uang saku, biaya SPP, dan komponen lainnya. Secara rinci, komponen dan besarnya belanja yang harus dikeluarkan orangtua santri pada awal tahun ajaran ketika anaknya masuk MTs pondok pesantren dapat dilihat pada tabel 16.



No	Komponen Pengeluaran	Madina	Labuhan Batu	Taparuli Selatan
		Pinggir	Pinggir	Pinggir
1	Uang pangkal/ bangunan	70.000	100.000	55.000
2	SPP	15.000	50.000	10.000
3	Biaya ulangan Umum	13.000	40.000	10.000
4	Biaya ujian nasional	10.000	60.000	37.500
5	Konsumsi/makan-minum	180.000	200.000	200.000
6	Astrama/pondokan	40.000	80.000	75.000
7	Biaya praktikum	17.500	45.000	-
8	Kegiatan ekstrakurikuler	28.000	-	-
9	Pakaian seragam/atribut	175.000	175.000	185.000
10	Pakaian olahraga	40.000	100.000	90.000
11	Pakaian sholar/ibadah	175.000	145.000	125.000
12	Pembelian buku pelajaran	215.000	185.000	155.000
13	Pembelian alat tulis	105.000	80.000	75.000
14	Pembelian sepatu	60.000	65.000	65.000
15	Pembelian tes	40.000	40.000	55.000
16	Uang saku santri	100.000	75.000	80.000
17	Biaya transportasi	-	-	-
18	Sumbangan sosial	5.000	5.000	5.000
19	PHBI	2.500	7.500	5.000
20	Cuci pakaian	40.000	40.000	40.000
21	Dana kesehatan	-	20.000	10.000
22	Dana organisasi santri	2.500	7.500	5.000
	Jumlah	1.333.500	1.520.000	1.282.500

Tabel 16: Pengeluaran orang tua santri MTs pondok pesantren se-Sumatara Utara (awal tahun ajaran)

No	Komponen Pengeluaran	Medan		D. Serdang		Langkat		Simalungun	
		Kota	Pinggir	Kota	Pinggir	Pinggir	Pinggir		
1	Uang pangkal/bangunan	900.000	525.000	500.000	400.000		150.000		
2	SPP	110.000	50.000	45.000	20.000		25.000		
3	Biaya ulangan Umum	50.000	30.000	20.000	15.000		40.000		
4	Biaya ujian nasional	-	20.000	25.000	20.000		-		
5	Konsumsi/makan-minum	192.500	187.500	130.000	170.000		125.000		
6	Astrama/pondokan	65.000	50.000	30.000	20.000		45.000		
7	Biaya praktikum	40.000	40.000	10.000	10.000		10.000		
8	Kegiatan ekstrakurikuler	85.000	50.000	6.000	4.500		10.000		
9	Pakaian seragam/atribut	250.000	200.000	150.000	150.000		150.000		
10	Pakaian olahraga	150.000	125.000	40.000	50.000		40.000		
11	Pakaian sholat/ibadah	400.000	150.000	150.000	100.000		120.000		
12	Pembelian buku pelajaran	425.000	215.000	80.000	100.000		175.000		
13	Pembelian alat tulis	200.000	100.000	30.000	50.000		75.000		
14	Pembelian sepatu	100.000	105.000	60.000	30.000		45.000		
15	Pembelian tas	50.000	50.000	30.000	20.000		30.000		
16	Uang saku santri	200.000	100.000	60.000	50.000		75.000		
17	Biaya transportasi	-	-	-	-		-		
18	Sumbangan sosial	8.000	5.000	5.000	5.000		6.000		
19	PHBI	10.000	10.000	1.000	1.000		10.000		
20	Cuci pakaian	45.000	40.000	40.000	20.000		40.000		
21	Dana kesetiaan	40.000	15.000	4.000	5.000		40.000		
22	Dana organisasi santi	62.500	17.000	1.000	1.000		2.000		
	Jumlah	3.383.000	2.084.500	1.417.000	1.241.500		1.213.000		



## 2. Pengeluaran Rutin Bulanan Orangtua Santri

Secara umum, setidaknya ada lima komponen utama yang harus didanai orangtua santri setiap bulannya kepada anak-anak mereka yang studi di MTs pondok pesantren Sumatera Utara, yaitu: (1) biaya SPP, (2) biaya konsumsi, (3) bayar asrama/pondokan, (4) uang saku santri, dan (5) cuci pakaian. Melalui studi ini ditemukan bahwa besaran biaya per bulan yang secara berkelanjutan dibelanjakan orangtua untuk kontinuitas studi anaknya di MTs pondok pesantren Sumatera Utara sangat variatif. Untuk MTs pondok pesantren kota Medan, komponen belanja terbesar yang harus dibiayai orangtua menyangkut uang saku santri yang kemudian diikuti berturut-turut oleh biaya konsumsi, SPP, sewa asrama, dan biaya cuci pakaian. Total biaya perbulan yang harus dibelanjakan orangtua santri rata-rata sebesar Rp. 627.000,-.

Berbeda dengan itu, untuk MTs pondok pesantren yang berada di luar kota Medan, komponen belanja terbesar pertama yang harus didanai orangtua adalah biaya konsumsi atau makan-minum santri dan uang saku. Peringkat pembiayaan berikutnya sangat variatif antara komponen biaya asrama, SPP, dan cuci pakaian. Secara rinci, belanja rutin yang setiap bulan dikeluarkan orangtua santri MTs pondok pesantren Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 17: Pengeluaran rutin orangtua santri MTs pondok pesantren Sumatera Utara/ bulan

No	Komponen Pengeluaran	Medan	Langkat			
		Kota	D. Serdang Pinggir	Kota	Pinggir	Simalungun Pinggir
1	SPP	110.000.-	50.000.-	45.000.-	20.000.-	25.000.-
2	Konsumsi/makan-minum	192.500.-	187.500.-	130.000.-	170.000.-	125.000.-
3	Asrama/pondokan	65.000.-	50.000.-	30.000.-	20.000.-	45.000.-
4	Uang saku santri	200.000.-	100.000.-	60.000.-	50.000.-	75.000.-
5	Cuci pakaian	45.000.-	40.000.-	40.000.-	20.000.-	40.000.-
Jumlah		612.500.-	427.500.-	305.000.-	280.000.-	310.000.-

### Sambungan

No	Komponen Pengeluaran	Madina	Labuhan Batu		Tapanuli Selatan	
		Pinggir	Pinggir		Pinggir	
1	SPP	15.000.-	50.000.-		10.000.-	
2	Konsumsi/makan-minum	180.000.-	200.000.-		200.000.-	
3	Asrama/pondokan	40.000.-	80.000.-		75.000.-	
4	Uang saku santri	100.000.-	75.000.-		80.000.-	
5	Cuci pakaian	40.000.-	40.000.-		40.000.-	
Jumlah		375.000.-	445.000.-		405.000.-	



Berdasarkan data di atas, bila seluruh komponen belanja rutin per bulan dijumlahkan, maka rata-rata belanja rutin yang harus dikeluarkan orangtua santri per tahun untuk membiayai pendidikan anak-anaknya *nyantri* pada MTs pondok pesantren Sumatera Utara adalah sebesar Rp. 4.221.429,-. Bila jumlah ini dirinci, MTs pondok pesantren kota Medan menempati ranking pertama yang menyedot dana terbesar dari orangtua atau keluarga santri. Posisi berikutnya ditempati oleh MTs pondok pesantren kabupaten Labuhan Batu, kemudian kabupaten Deli Serdang, kabupaten Tapanuli Selatan, kabupaten Madina, kabupaten Simalungun, dan akhirnya kabupaten Langkat (lihat tabel 18)

Tabel 18: Pengeluaran rutin orangtua santri MTs pondok pesantren Sumatera Utara/ tahun

No	Kota/Kabupaten	Jumlah Pengeluaran
1	Medan	Rp. 7.350.000.-
2	Deli Serdang	Rp. 5.130.000.-
3	Langkat	Rp. 3.510.000.-
4	Simalungun	Rp. 3.720.000.-
5	Madina	Rp. 4.500.000.-
6	Labuhan Batu	Rp. 5.340.000.-
7	Tapanuli Selatan	Rp. 4.860.000.-
Jumlah Rata-Rata		4.221.429.-

## BAB IV

### UNIT COST SANTRI MADRASAH ALIYAH PONDOK PESANTREN SUMATERA UTARA

#### A. Sumber-Sumber Pembiayaan Madrasah Aliyah Pondok Pesantren

Berdasar penelitian lapangan yang dilakukan, diketahui bahwa pembiayaan penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah Aliyah (MA) pondok pesantren Sumatera Utara berasal dari dua sumber utama, yaitu: (1) pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dan (2) orangtua atau keluarga santri. Sumber pembiayaan yang berasal dari pemerintah pusat diperoleh MA pondok pesantren Sumatera Utara melalui Bantuan Khusus Murid (BKM). Kemudian sumber pembiayaan yang berasal dari pemerintah daerah diperoleh lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diperoleh MA pondok pesantren setiap tahunnya. Sedangkan sumber pembiayaan yang berasal dari orangtua atau keluarga santri diperoleh MA pondok pesantren melalui dana Sumbangan Pembiayaan Pendidikan (SPP) dan biaya konsumsi atau makan-minum santri

Dari seluruh sampel studi diketahui bahwa orangtua atau keluarga santri merupakan *funding* utama dalam membiayai



penyelenggaraan pendidikan pada MA pondok pesantren Sumatera Utara. Dalam kasus ini, dari seluruh sampel studi, bahkan terdapat empat MA pondok pesantren yang sumber pembiayaan pendidikannya 100% berasal dari orangtua atau keluarga santri. Sedangkan MA pondok pesantren lainnya, kontribusi pembiayaan dari orangtua atau keluarga santri diperoleh lewat dana SPP dan konsumsi yang rata-rata mencapai 91,55% (terendah) sampai 94,47% (tertinggi). Berdasar angka-angka tersebut, maka sumber pembiayaan dari pemerintah dalam membantu penyelenggaraan pendidikan pada MA pondok pesantren Sumatera Utara hanya berkisar antara 5,28% (terendah) sampai 8,45% (tertinggi). Data-data rinci mengenai besarnya kontribusi dari kedua sumber pembiayaan tersebut dapat dilihat pada tabel 19 berikut:

Tabel 19: Besaran persentase pembiayaan pemerintah dan orangtua pada MA pondok pesantren Sumatera Utara/ tahun

No	Kabupaten/Kota	Sumber dana (Rp)			
		Pemerintah	%	Orangtua	%
1.	Medan	-	-	2.747.010.000,-	100
2.	Deli Serdang	-	-	1.687.140.000,-	100
3.	Langkat: kota	25.990.000,-	6,37	382.200.000,-	93,63
	p. kota	12.480.000,-	5,28	223.440.000,-	94,47
4.	Simalungun	13.650.000,-	8,45	147.840.000,-	91,55
5.	Labuhan Batu	-	-	1.185.000.000,-	100
6.	Tapanuli Selatan	34.200.000,-	6,51	491.400.000,-	93,49
7.	Mandailing Natal	-	-	492.400.000,-	100

Dari seluruh pondok pesantren yang distudi, diketahui bahwa hanya enam MA pondok pesantren yang mendapat Bantuan Khusus Murid (BKM) dari pemerintah, yaitu dua pondok pesantren di kabupaten Langkat, dua pondok pesantren di kabupaten Simalungun, dan dua pondok pesantren di kabupaten Tapanuli Selatan. Kemudian, berdasar hasil studi diketahui pula bahwa satu-satunya MA pondok pesantren yang memperoleh sumber pembiayaan dari pemerintah daerah (Pemda) adalah MA pondok pesantren Ulumul Qur'an yang berada di kabupten Langkat kota. Berdasarkan sumber Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pondok Pesantren (RAPBPP) diketahui bahwa tidak satu pun MA pondok pesantren Sumatera Utara yang memperoleh sumber dana untuk membiayai pelaksanaan pendidikannya dari yayasan dan *infaq* atau *wakaf* masyarakat. Secara spesifik, sumber-sumber pembiayaan MA pondok pesantren Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel 20 berikut:



## B. Belanja Rutin/Pengeluaran Madrasah Aliyah Pondok Pesantren

Tidak berbeda dengan jenjang Tsanawiyah, belanja rutin Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Sumatera Utara juga mencakup delapan komponen pengeluaran, yaitu: (1) gaji, (2) belanja ATK, (3) langganan daya dan jasa, seperti listrik, air, telepon, dan koran, (4) kegiatan belajar mengajar, (5) pemeliharaan dan perawatan gedung/sarana, (6) pembinaan dan peningkatan kualitas guru, (7) konsumsi santri dan guru, dan (8) pengeluaran lain-lain, seperti untuk porseni, kegiatan ekstra kurikuler, dan insentif guru.

Berdasarkan data RAPBPP, pengeluaran rutin terbesar pertama yang harus didanai MA pondok pesantren kota Medan, kabupaten Langkat, Deli Serdang, dan Simalungun adalah konsumsi yang diikuti oleh komponen gaji. Berbeda dengan itu, untuk MA pondok pesantren kabupaten Labuhan Batu, Tapanuli Selatan dan Madina, belanja rutin yang merupakan pengeluaran terbesar pertama ditempati oleh komponen gaji kemudian konsumsi santri/guru. Secara rinci, belanja rutin MA pondok pesantren Sumatera Utara untuk komponen gaji dan konsumsi dapat dilihat pada tabel 21 berikut:

Tabel 20: Sumber-Sumber Pembiayaan Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Sumatera Utara (pertahun) Unit Cost Santri 64

No	Sumber Dana	Medan		Deli Serdang		Langkat	
		Pinggir kota	Pinggir kota	Pinggir kota	Pinggir kota	Pinggir kota	Pinggir kota
1	Pemerintah melalui BKM	-	-	-	15.990.000.-	12.480.000.-	-
2	Pemko/Pemda	-	-	-	10.000.000.-	-	-
3	Dana Komite melalui SPP/Konsumsi	2.747.010.000.-	1.687.140.000.-	382.200.000.-	223.440.000.-	-	-
4	Yayasan	-	-	-	-	-	-
5	Infag/Wakat/Donatur	-	-	-	-	-	-
Jumlah		2.747.010.000.-	1.687.140.000.-	408.190.000.-	235.920.000.-	-	-
sambungan							
No	Sumber Dana	Simalungun		Madina		Labuhan Batu	
		Pinggir kota	Pinggir kota	Pinggir kota	Pinggir kota	Pinggir kota	Pinggir kota
1	Pemerintah melalui BKM	13.650.000.-	-	-	34.320.000.-	-	-
2	Pemko/Pemda	-	-	-	-	-	-
3	Dana Komite melalui SPP/Konsumsi	147.840.000.-	492.400.000.-	1.185.000.000.-	491.400.000.-	-	-
4	Yayasan	-	-	-	-	-	-
5	Infag/Wakat/Donatur	-	-	-	-	-	-
Jumlah		161.490.000.-	492.400.000.-	1.185.000.000.-	525.720.000.-	-	-



Tabel 21: Belanja atau Pengeluaran MA pondok pesantren untuk komponen gaji dan konsumsi santri-guru/ tahun

No	Kabupaten/Kota	Komponen dan Jumlah Pengeluaran/ Pembiayaan (Rp)	
		Gaji	Konsumsi
1.	Medan	847.500.000,-	1.665.510.000,-
2.	Deli Serdang	477.830.000,-	1.028.500.000,-
3.	Mandailing Natal	378.500.000,-	-
4.	Tapanuli Selatan	250.100.000,-	155.000.000,-
5.	Labuhan Batu	235.000.000,-	115.000.000,-
6.	Langkat: kota	139.700.000,-	200.920.000,-
	Pgr. Kota	86.250.000,-	100.250.000,-
7.	Simalungun	58.775.000,-	69.300.000,-

Tabel di atas memperlihatkan bahwa hanya MA pondok pesantren kabupaten Madina yang tidak mengeluarkan biaya untuk konsumsi santri-guru. Hal ini dikarenakan pondok pesantren kabupaten Madina, baik Musthafawiyah Purbabaru maupun Ma'had Darul Ikhlas Dalam Lidang, keduanya merupakan pondok pesantren *salafiyah* dimana para santri dan guru secara mandiri memenuhi sendiri kebutuhan makan-minumnya masing-masing. Karena itu, biaya konsumsi santri-guru tidak termasuk belanja rutin yang harus didanai oleh pondok pesantren kabupaten Madina.

Berdasarkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pondok Pesantren (RAPBPP), setelah komponen konsumsi dan gaji, KBM merupakan komponen pembiayaan peringkat ketiga terbesar yang harus didanai oleh MA pondok pesantren. Dalam konteks ini, MA pondok pesantren kabupaten Tapanuli Selatan menempati posisi pertama dengan nominal belanja sebesar Rp. 81.000.000,-, diikuti berturut-turut oleh kota Medan sebesar Rp. 75.000.000,-, kabupaten Labuhan Batu sebesar Rp. 72.000.000,-, kabupaten Madina sebesar Rp. 55.000.000,-, kabupaten Deli Serdang sebesar Rp. 33.050.000,-, kabupaten Langkat sebesar Rp. 27.500.000,- (kota) dan Rp. 19.350.000,- (pinggir kota), dan kabupaten Simalungun dengan belanja sebesar Rp. 11.100.000,-.

Tabel 22: Pengeluaran MA Pondok Pesantren untuk KBM/ tahun

Peringkat	Kabupaten/Kota	Jumlah Pengeluaran/ Pembiayaan
1	Tapanuli Selatan	Rp. 81.000.000,-
2	Medan	Rp. 75.000.000,-
3	Labuhan Batu	Rp. 72.000.000,-
4	Mandailing Natal	Rp. 55.000.000,-
5	Deli Serdang	Rp. 33.050.000,-
6	Langkat: kota	Rp. 27.500.000,-
	Pgr. kota	Rp. 19.350.000,-
7	Simalungun	Rp. 11.100.000,-



Data yang tertera dalam RAPBPP menunjukkan bahwa belanja terbesar berikutnya yang didanai pondok pesantren adalah langganan daya dan jasa atau pengeluaran untuk membayar rekening listrik, air, dan telepon. Dalam hal ini, MA pondok pesantren kota Medan menempati urutan pertama yang paling banyak mengeluarkan belanja atau biaya untuk membayar langganan daya dan jasa. Posisi tersebut berturut-turut diikuti oleh MA pondok pesantren kabupaten Madina, Tapanuli Selatan, Deli Serdang, Labuhan Batu, Langkat kota, Simalungun, dan akhirnya Langkat pinggir kota. Secara rinci mengenai besaran pengeluaran MA pondok pesantren untuk langganan daya dan jasa ini bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 23: Pengeluaran MA Pondok Pesantren untuk belanja daya dan jasa/ tahun

Peringkat	Kabupaten/Kota	Jumlah Pengeluaran/ Pembiayaan (Rp)
1	Medan	Rp. 57.500.000,-
2	Mandailing Natal	Rp. 19.600.000,-
3	Tapanuli Selatan	Rp. 17.200.000,-
4	Deli Serdang	Rp. 16.000.000,-
5	Labuhan Batu	Rp. 11.580.000,-
6	Langkat kota	Rp. 11.100.000,-
7	Simalungun	Rp. 8.100.000,-
8	Langkat pgr. kota	Rp. 6.200.000,-

Komponen pembiayaan peringkat berikutnya yang didanai MA pondok pesantren adalah pengeluaran untuk membayar insentif guru. Dalam hal ini, MA pondok pesantren kabupaten Madina menempati ranking pertama diikuti secara berturut-turut oleh MA pondok pesantren kota Medan, kabupaten Madina, Deli Serdang, Labuhan Batu, Langkat, dan akhirnya Simalungun. Secara rinci mengenai besaran belanja MA pondok pesantren untuk membiayai insentif guru dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 24: Pengeluaran MA Pondok Pesantren untuk belanja insentif guru (per tahun)

Peringkat	Kabupaten/Kota	Jumlah Pengeluaran/ Pembiayaan (Rp)
1	Tapanuli Selatan	Rp. 20.000.000,-
2	Medan	Rp. 16.250.000,-
3	Mandailing Natal	Rp. 12.500.000,-
4	Deli Serdang	Rp. 12.000.000,-
5	Labuhan Batu	Rp. 10.000.000,-
6	Langkat: kota pgr. kota	Rp. 8.500.000,- 4.500.000,-
7	Simalungun	Rp. 3.750.000,-

Berdasar pengamatan di lapangan, ada dua kecenderungan yang tampak dari besarnya biaya pengeluaran MA pondok



pesantren untuk membiayai komponen insentif guru, yaitu: (1) jumlah guru dan kelas pada suatu pondok pesantren, dan (2) lokasi pondok pesantren. Banyaknya jumlah guru pada suatu MA pondok pesantren tentu saja menyedot dana yang lebih besar dalam pemberian insentif guru bila dibanding dengan pondok pesantren yang memiliki jumlah guru yang relatif sedikit. Dalam kenyataannya, banyaknya jumlah guru ini umumnya bergantung pada banyaknya jumlah kelas dan santri pada suatu pondok pesantren. Kemudian, letak MA pondok pesantren di perkotaan ternyata berpengaruh terhadap besaran insentif yang dibayarkan kepada guru. Sepertinya, hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa harga atau biaya kebutuhan hidup di perkotaan relatif lebih tinggi bila dibanding dengan pingir kota ataupun pedesaan.

Sumber RAPBPP menunjukkan bahwa belanja berikutnya yang juga menyedot pembiayaan dari MA pondok pesantren adalah pembinaan dan peningkatan kualitas guru. Berdasarkan wawancara dengan para pimpinan MA pondok pesantren, diketahui bahwa bentuk kegiatan dalam pembinaan dan peningkatan kualitas guru yang selama ini baru bisa *difunding* MA pondok pesantren masih terbatas pada kegiatan mengirimkan guru untuk mengikuti penataran, pelatihan, dan sejumlah pertemuan rutin dengan instansi Departemen Agama dan Departemen Pendidikan Nasional. Besaran riil belanja MA

pondok pesantren untuk membiayai komponen pembinaan dan peningkatan kualitas guru ini dapat dilihat pada tabel 25.

Tabel 25: Pengeluaran MA Pondok Pesantren untuk pembinaan dan peningkatan kualitas guru (pertahun)

Peringkat	Kabupaten/Kota	Jumlah Pengeluaran/ Pembiayaan (Rp)
1	Medan	Rp. 12.500.000,-
2	Mandailing Natal	Rp. 11.500.000,-
3	Tapanuli Selatan	Rp. 10.000.000,-
3	Deli Serdang	Rp. 10.000.000,-
3	Labuhan Batu	Rp. 10.000.000,-
4	Langkat: kota	Rp. 7.500.000,-
5.	Simalungun	Rp. 4.000.000,-
7	Langkat pgr. kota	Rp. 3.000.000,-

Belanja peringkat berikutnya yang dibiayai MA pondok pesantren adalah pengeluaran untuk pemeliharaan dan perawatan gedung/ sarana atau fasilitas dan pembelian ATK. Untuk dua komponen pembiayaan ini, rata-rata pengeluaran MA pondok pesantren setahun berkisar antara Rp. 1.800.000,- terendah sampai Rp. 10.500.000,- tertinggi. Secara rinci berdasar pengeluaran MA pondok pesantren untuk kedua komponen ini bisa dilihat pada tabel 26.



Tabel 26: Pengeluaran MA Pondok Pesantren untuk pemeliharaan gedung/sarana dan belanja ATK (pertahun)

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Pengeluaran (Rp)		No
		pemeliharaan gedung/sarana	Belanja ATK	
1	Medan	10.000.000,-	10.500.000,-	1
2	Tapanuli Selatan	9.000.000,-	2.655.000,-	5
3	Labuhan Batu	8.000.000,-	8.500.000,-	2
4	Deli Serdang	6.000.000,-	3.760.000,-	3
4	Mandailing Natal	6.000.000,-	3.200.000,-	4
5	Langkat: kota	2.500.000,-	2.100.000,-	6
5	Simalungun	2.500.000,-	1.800.000,-	8
6	Langkat pgr. kota	2.000.000,-	2.000.000,-	7

Tabel di atas memperlihatkan bahwa MA pondok pesantren kota Medan menempati rangking pertama dalam hal belanja ATK dan pemeliharaan gedung serta sarana. Namun posisi berikutnya untuk belanja kedua komponen ini sangat variatif. Sebagai contoh, meskipun MA pondok pesantren kabupaten Tapanuli Selatan menempati rangking kedua dalam belanja pemeliharaan gedung dan sarana, namun ia menempati rangking kelima dalam belanja ATK. Demikian pula, meskipun MA pondok pesantren kabupaten Labuhan Batu menempati rangking ketiga dalam belanja pemeliharaan gedung dan sarana,

tetapi ia menempati rangking kedua dalam belanja ATK. Demikian seterusnya.

Tabel di atas juga memperlihatkan adanya MA pondok pesantren yang rata-rata belanjanya relatif sama antara komponen pemeliharaan gedung dan sarana dengan ATK, yaitu MA pondok pesantren kota Medan, MA pondok pesantren kabupaten Labuhan Batu dan MA pondok pesantren kabupaten Langkat.

### C. Pengeluaran Orangtua Santri Madrasah Aliyah Pondok Pesantren

#### 1. Pengeluaran pada awal tahun ajaran

Bagi para orangtua yang mempercayakan pendidikan anak-anaknya ke MA pondok pesantren kota Medan, kabupaten Deli Serdang, Langkat, dan Simalungun, pengeluaran terbesar yang harus mereka danai pada awal tahun ajaran adalah biaya uang pangkal. Rata-rata orangtua santri harus mengeluarkan biaya antara Rp. 150.000,- (terendah) sampai Rp. 900.000 (tertinggi). Komponen berikutnya yang menempati peringkat kedua yang harus didanai orangtua adalah pembelaian kitab. Untuk komponen ini, orangtua yang mendaftarkan anak-anaknya ke MA pondok pesantren kota Medan, kabupaten Deli Serdang, Langkat kota, dan Simalungun, rata-rata harus



mengeluarkan biaya antara Rp. 150.000,- sampai Rp. 425.000,-. Belanja tertinggi ditempati MA pondok pesantren kota Medan dan terendah MA pondok pesantren kabupaten Simalungun.

Berbeda dengan itu, bagi para orangtua yang memasukkan anaknya ke MA pondok pesantren kabupaten Madina dan Labuhan Batu, pengeluaran terbesar pertama yang harus mereka danai adalah menyangkut biaya pembelian kitab. Rata-rata pengeluaran orangtua pada awal tahun ajaran untuk pembelian kitab ini sebesar Rp.250.000,-. Sedangkan untuk MA kabupaten Tapanuli Selatan, pengeluaran terbesar pertama yang harus didanai orangtua adalah menyangkut biaya konsumsi atau makan-minum santri, yaitu sebesar Rp. 200.000,- dan posisi kedua pembelian pakaian. Sedangkan untuk MA pondok pesantren kabupaten Madina dan Labuhan Batu, komponen pembiayaan yang menempati peringkat kedua yang harus didanai orangtua adalah menyangkut biaya konsumsi, yaitu bekisar antara Rp. 180.000,- sampai Rp. 200.000,-.

Di luar komponen belanja kitab dan konsumsi, manakala belanja untuk pembelian pakaian disatukan, yaitu pembelian pakaian seragam, pakaian ibadah, dan pakaian olah raga, maka pengeluaran orangtua santri pada awal tahun ajaran untuk membiayai komponen ini sebenarnya menempati rangking kedua setelah uang pangkal. Rata-rata, untuk belanja pakaian orangtua harus mengeluarkan biaya sebesar Rp. 800.000,-

(tertinggi) dan Rp. 310.000,- (terendah). Posisi pertama tertinggi untuk belanja komponen ini ditempati oleh MA pondok pesantren kota Medan dan terendah MA pondok pesantren kabupaten Simalungun. Secara rinci besaran jumlah pengeluaran orangtua untuk membiayai komponen belanja pakaian seragam, pakaian ibadah, dan pakaian olah raga bisa dilihat pada tabel 27.

Tabel 27: Pengeluaran orangtua santri MA pondok pesantren untuk pembelian pakaian (awal tahun ajaran)

Peringkat	Kabupaten/Kota	Jumlah Pengeluaran/ Pembiayaan (Rp)
1	Medan	Rp. 800.000,-
2	Tapanuli Selatan	Rp. 585.000,-
3	Deli Serdang	Rp. 475.000,-
4	Labuhan Batu	Rp. 432.500,-
5	Mandailing Natal	Rp. 390.000,-
6	Langkat pgr. Kota	Rp. 350.000,-
7	Langkat kota	Rp. 340.000,-
8	Simalungun	Rp. 310.000,-

Komponen pembiayaan terbesar berikutnya yang harus didanai orangtua santri pada awal tahun ajaran adalah pembelian buku pelajaran dan alat tulis. Untuk belanja ini, setiap orangtua rata-rata harus mengeluarkan biaya sebesar Rp. 50.000,- (terendah) sampai Rp. 200.000,- (tertinggi). Belanja tertinggi



ditempati oleh MA pondok pesantren kota Medan dan terendah MA pondok pesantren kabupaten Langkat. Secara rinci, pengeluaran orangtua untuk komponen pembiayaan ini bisa dilihat pada tabel 28.

Tabel 28: Pengeluaran orangtua santri MA pondok pesantren untuk pembelian buku dan alat tulis (awal tahun ajaran)

Peringkat	Kabupaten/Kota	Jumlah Pengeluaran/ Pembiayaan (Rp)
1	Medan	Rp. 200.000,-
2	Mandailing Natal	Rp. 125.000,-
3	Deli Serdang	Rp. 100.000,-
3	Simalungun	Rp. 100.500,-
4	Tapanuli Selatan	Rp. 75.000,-
5	Labuhan Batu	Rp. 90.000,-
6	Langkat	Rp. 50.000,-

Komponen pembiayaan berikutnya yang banyak menyedot dana orangtua pada awal tahun anaknya masuk ke MA pondok pesantren Sumatera Utara sangat bervariasi, dari mulai biaya SPP, uang saku, penyediaan alat pembelajaran, biaya asrama atau pondokan, dan biaya komponen lainnya.

Sama halnya dengan jenjang MTs, dapat dikemukakan bahwa awal tahun ajaran merupakan masa dimana para orangtua santri harus mengeluarkan dana dalam jumlah terbesar untuk

membiayai pendidikan anaknya yang studi pada MA pondok pesantren Sumatera Utara. Dari seluruh sampel yang distudi, pondok pesantren kota Medan menempati rangking pertama dengan rata-rata total belanja sebesar Rp. 3.433.000,- yang harus dikeluarkan orangtua santri pada awal tahun ajaran ketika anaknya masuk MA pondok pesantren. Posisi tersebut berturut-turut diikuti oleh MA pondok pesantren kabupaten Deli Serdang sebesar Rp. 2.119.500,-, kabupaten Labuhan Batu sebesar Rp. 1.732.500,-, kabupaten Langkat sebesar Rp. 1.677.000 MA (kota) dan Rp. 1.396.500,- (pinggir kota), kabupaten Tapanuli Selatan sebesar Rp. 1.385.500,-, dan posisi akhir ditempati kabupaten Simalungun dengan nominal sebesar Rp. 1.326.500,-.

Secara rinci, besarnya pengeluaran yang harus dikeluarkan orangtua santri MA pondok pesantren Sumatera Utara beserta komponen pengeluaran pada awal tahun ajaran ketika anaknya masuk ke pesantren dapat dilihat pada tabel 29.



sambungan

sambungan							
No	Komponen	Madina		Labuhan Batu		Tapanuli Selatan	
		Pinggir		Pinggir		Pinggir	
	Pengeluaran						
1	Uang pangkal/bangunan	70.000.-		115.000.-		57.500.-	
2	SPP	21.500.-		50.000.-		15.000.-	
3	Biaya ulangan Umum	15.000.-		40.000.-		10.500.-	
4	Biaya ujian nasional	50.000.-		60.000.-		37.500.-	
5	Konsumsi/makan-minum	180.000.-		200.000.-		200.000.-	
6	Asrama/pondokan	40.000.-		80.000.-		75.000.-	
7	Biaya praktikum	17.500.-		62.500.-		-	
8	Kegiatan ekstrakurikuler	28.000.-		-		-	
9	Pakaian: a. seragam/atribut b. olahraga c. sholat/ibadah	175.000.-		250.000.-		195.000.-	
		40.000.-		135.000.-		87.500.-	
		175.000.-		200.000.-		150.000.-	
		250.000.-		250.000.-		185.000.-	
10	Pembelian kitab	125.000.-		90.000.-		75.000.-	
11	Pembelian buku & alat tulis	112.000.-		75.000.-		70.000.-	
12	Pembelian sepatu	40.000.-		40.000.-		55.000.-	
13	Pembelian tas	100.000.-		75.000.-		62.500.-	
14	Uang saku santri	-		-		-	
15	Biaya transportasi	5.000.-		5.000.-		5.000.-	
16	Sumbangan sosial	2.500.-		7.500.-		5.000.-	
17	PHBI	40.000.-		45.000.-		40.000.-	
18	Cuci pakaian	-		20.000.-		10.000.-	
19	Dana kesehatan	2.500.-		7.500.-		5.000.-	
20	Dana organisasi santri	1.488.750.-		1.732.500.-		1.385.500.-	
	Jumlah						

Tabel 29. Pengeluaran Orang Tua Santri MA di Pesantren Sumatera Utara (Awal Tahun Ajaran)

No	Komponen	Medan	D.Serdang	Langkat	Simalungun
	Pengeluaran	Kota	Pinggir	Kota	Pinggir
1	Uang pangkal/bangunan	900.000.-	525.000.-	500.000.-	150.000.-
2	SPP	125.000.-	70.000.-	45.000.-	35.000.-
3	Biaya ulangan Umum	50.000.-	30.000.-	40.000.-	40.000.-
4	Biaya ujian nasional	-	-	150.000.-	-
5	Konsumsi/makan-minum	192.500.-	187.500.-	130.000.-	125.000.-
6	Astrama/pondokan	65.000.-	50.000.-	30.000.-	45.000.-
7	Biaya praktikum	50.000.-	40.000.-	10.000.-	10.000.-
8	Kegiatan ekstrakurikuler	85.000.-	50.000.-	6.000.-	10.000.-
9	Pakaian: a. seragam/atribut b. olahraga c. sholat/ibadah	250.000.-	200.000.-	150.000.-	150.000.-
		150.000.-	125.000.-	40.000.-	40.000.-
		400.000.-	150.000.-	150.000.-	120.000.-
10	Pembelian kitab	425.000.-	250.000.-	150.000.-	240.000.-
11	Pembelian buku dan alat tulis	200.000.-	100.000.-	50.000.-	100.000.-
12	Pembelian sepatu	120.000.-	105.000.-	60.000.-	42.500.-
13	Pembelian tas	55.000.-	50.000.-	30.000.-	40.000.-
14	Uang saku santri	200.000.-	100.000.-	60.000.-	75.000.-
15	Biaya transportasi	-	-	25.000.-	-
16	Sumbangan sosial	8.000.-	5.000.-	5.000.-	6.000.-
17	PHBI	10.000.-	10.000.-	1.000.-	10.000.-
18	Cuci pakaian	45.000.-	40.000.-	40.000.-	40.000.-
19	Dana kesehatan	40.000.-	15.000.-	4.000.-	40.000.-
20	Dana organisasi santri	62.500.-	17.000.-	1.000.-	2.000.-
	Jumlah	3.433.000.-	2.119.500.-	1.677.000.-	1.326.500.-



## 2. Pengeluaran Rutin Bulanan

Berdasar hasil studi diketahui bahwa besaran biaya perbulan yang secara berkelanjutan dibelanjakan orangtua santri ke MA pondok pesantren Sumatera Utara sangat variatif. Khusus untuk MA pondok pesantren kota Medan, komponen pengeluaran terbesar orangtua adalah uang saku santri yang kemudian diikuti oleh belanja konsumsi, SPP, pondokan atau asrama, dan cuci pakaian. Sedangkan untuk seluruh MA pondok pesantren lainnya, komponen pembiayaan terbesar pertama yang harus dikeluarkan orangtua santri adalah biaya konsumsi atau makan-minum santri yang kemudian secara variatif diikuti oleh belanja uang saku, pondokan atau asrama, SPP, dan cuci pakaian.

Pengeluaran rutin orangtua santri untuk membiayai konsumsi makan-minum anaknya setiap bulan bervariasi antara satu MA pondok pesantren dengan MA pondok pesantren lainnya. Rata-rata, orangtua harus mengeluarkan biaya antara Rp. 125.000,- sampai Rp. 200.000,-/ bulan. Biaya konsumsi tertinggi ditempati oleh MA pondok pesantren di kabupaten Tapanuli Selatan dan Labuhan Batu, dan biaya terendah ditempati oleh MA pondok pesantren kabupaten Simalungun. Rincian belanja konsumsi bulanan yang dibiayai orangtua santri tersebut dapat dilihat pada tabel 30.

Tabel 30: Rata-rata pengeluaran orangtua MA pondok pesantren untuk biaya konsumsi santri/ bulan

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Pengeluaran/ Pembiayaan (Rp)
1	Tapanuli Selatan	Rp. 200.000,-
1	Labuhan Batu	Rp. 200.000,-
2	Medan	Rp. 192.000,-
3	Deli Serdang	Rp. 187.500,-
4	Mandailing Natal	Rp. 180.000,-
5	Langkat pinggir kota	Rp. 170.000,-
6	Langkat kota	Rp. 130.000,-
7	Simalungun	Rp. 125.000,-

Selain mengeluarkan biaya rutin bulanan untuk konsumsi, orangtua juga mengeluarkan biaya untuk uang saku anak-anaknya yang studi pada MA pondok pesantren. Sebagaimana dikemukakan di atas, untuk MA pondok pesantren kota Medan, komponen uang saku bahkan menempati posisi tertinggi pertama dalam hal pengeluaran yang harus dibiayai orangtua setiap bulannya. Sementara itu, untuk MA pondok pesantren di kabupaten Deli Serdang, Langkat, Simalungun, dan Madina, uang saku menempati rangking terbesar kedua dari pengeluaran atau belanja bulanan orangtua. Sedangkan untuk MA pondok pesantren di kabupaten



Tapanuli Selatan dan Labuhan Batu, komponen uang saku merupakan belanja ketiga terbesar yang harus dibiayai orangtua santri setiap bulannya. Rincian besarnya pengeluaran orangtua santri untuk komponen uang saku dari seluruh sampel studi dapat dilihat pada tabel 31.

Tabel 31: Rata-rata pengeluaran orangtua santri MA pondok pesantren untuk uang saku (perbulan)

Peringkat	Kabupaten/Kota	Jumlah Pengeluaran/ Pembiayaan (Rp)
1	Medan	Rp. 200.000,-
2	Deli Serdang	Rp. 100.000,-
2	Mandailing Natal	Rp. 100.000,-
3	Labuhan Batu	Rp. 80.000,-
4	Simalungun	Rp. 75.000,-
5	Tapanuli Selatan	Rp. 62.500,-
6	Langkat kota	Rp. 60.000,-
7	Langkat pinggir kota	Rp. 50.000,-

Belanja rutin bulanan berikutnya yang harus dikeluarkan orangtua santri adalah biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP). Untuk komponen ini, rata-rata orangtua santri harus mengeluarkan belanja antara Rp. 15.000,- (terendah) sampai Rp. 125.000,- (tertinggi). Biaya SPP tertinggi ditempati oleh MA pondok

pesantren kota Medan dan terendah MA pondok pesantren kabupaten Tapanuli Selatan. Mengenai hal ini secara rinci bisa dilihat pada tabel 32.

Tabel 32: Rata-rata pengeluaran orangtua santri MA pondok pesantren untuk SPP/ bulan

Peringkat	Kabupaten/Kota	Jumlah Pengeluaran/ Pembiayaan (Rp)
1	Medan	Rp. 125.000,-
2	Deli Serdang	Rp. 70.000,-
3	Labuhan Batu	Rp. 50.000,-
4	Langkat kota	Rp. 45.000,-
5	Simalungun	Rp. 35.000,-
6	Mandailing Natal	Rp. 21.500,-
7	Langkat pinggir kota	Rp. 20.000,-
8	Tapanuli Selatan	Rp. 15.000,-

Komponen berikutnya yang harus dibelanjakan orangtua secara berkesinambungan setiap bulan guna kelanjutan studi anaknya pada MA pondok pesantren Sumatera Utara adalah biaya asrama atau pondokan. Untuk komponen ini, rata-rata orangtua harus mengeluarkan biaya antara Rp. 20.000 sampai Rp. 80.000,- setiap bulannya. Biaya asrama tertinggi ditempati oleh MA pondok pesantren kabupaten Labuhan Batu dan terendah MA pondok



pesantren kabupaten Langkat pingir kota. Data yang rinci tentang hal ini sebagaimana tertera pada tabel 33.

Tabel 33: Rata-rata pengeluaran orangtua santri MA pondok pesantren untuk biaya asrama (perbulan)

Peringkat	Kabupaten/Kota	Jumlah Pengeluaran/ Pembiayaan (Rp)
1	Labuhan Batu	Rp. 80.000,-
2	Tapanuli Selatan	Rp. 75.000,-
3	Medan	Rp. 65.000,-
4	Deli Serdang	Rp. 50.000,-
5	Simalungun	Rp. 45.000,-
6	Mandailing Natal	Rp. 40.000,-
7	Langkat kota	Rp. 30.000,-
8	Langkat pinggir kota	Rp. 20.000,-

Berikutnya, belanja rutin yang harus dikeluarkan orangtua setiap bulan adalah biaya cuci pakaian yang mencakup pembelian sabun atau detergen, *blue* atau pewarna, pewangi, dan seterika pakaian. Umumnya santri mencuci sendiri pakaian seragam, pakaian ibadah, pakaian olah raga, dan pakaian hariannya. Kecuali MA pondok pesantren kota Medan dan kabupaten Labuhan Batu, untuk biaya cuci pakaian ini rata-rata orangtua harus mengeluarkan biaya sebesar Rp 40.000,- setiap bulannya. Sedangkan untuk MA pondok

pesantren kota Medan dan kabupaten Labuhan Batu, rata-rata pengeluaran untuk cuci pakaian sebesar Rp. 45.000,- setiap bulannya.

Meskipun semua santri *mondok* di asrama atau *gubuk-gubuk* kecil di sekitar pesantren, namun bagi orangtua yang mempercayakan pendidikan anaknya ke MA pondok pesantren kabupaten Langkat kota, pengeluaran rutin bulanan berikutnya yang harus mereka belanjakan adalah biaya transportasi santri sebesar Rp. 25.000,-. Sedangkan untuk MA pondok pesantren lainnya, biaya transportasi ini tidak termasuk biaya bulanan, sebab para santri umumnya hanya kembali ke rumah orangtua atau keluarganya masing-masing pada setiap akhir semester atau setelah selesai mengikuti ujian kenaikan kelas. Karena itu, biaya transportasi tidak termasuk pengeluaran rutin bulanan, tetapi pengeluaran rutin per semester atau bahkan sekali setahun. Pada sejumlah MA pondok pesantren, umumnya orangtua atau keluarga santri datang berkunjung sambil mengantarkan biaya atau perbekalan yang dibutuhkan anaknya. Sementara itu, ada juga orangtua yang langsung mentransfer biaya yang diperlukan anaknya dengan menggunakan jasa bank. Begitu pun, terdapat juga santri yang pulang-pergi mengambil perbekalan ke rumah orangtua atau keluarganya setiap libur belajar. Kasus seperti ini umum di temui pada santri MA pondok pesantren kabupaten Mandailing Natal dan



Tapanuli Selatan yang rumah orangtua atau keluarganya tidak jauh dari lokasi pondok pesantren. Namun ketika angket disebar, tidak ada santri yang bersedia mengemukakan jumlah biaya transportasi yang mereka belanjakan untuk pulang pergi dari pesantren ke rumah orangtua atau keluarganya. Karena itu, data rinci mengenai hal ini belum ditemukan.

Dari seluruh data yang telah disajikan di atas dapat diketahui bahwa orangtua yang mempercayakan pendidikan anaknya ke MA pondok pesantren kota Medan mengeluarkan belanja rutin bulanan yang lebih besar bila dibanding dengan orangtua yang menyekolahkan anaknya ke MA pondok pesantren luar kota Medan. Pengeluaran rutin bulanan terbesar kedua ditempati oleh MA pondok pesantren kabupaten Deli Serdang yang secara berturut-turut diikuti oleh MA pondok pesantren kabupaten Labuhan Batu, Tapanuli Selatan, Madina, Langkat kota, Simalungun, dan akhirnya Langkat pinggir kota. Data rinci tentang rata-rata total pengeluaran rutin bulanan orangtua atau keluarga santri MA pondok pesantren Sumatera Utara ini sebagaimana tertera pada tabel 34.

Tabel 34: Rata-rata pengeluaran rutin bulanan orangtua santri MA pondok pesantren Sumatera Utara

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Pengeluaran/ Pembiayaan (Rp)
1	Medan	Rp. 627.500,-
2	Deli Serdang	Rp. 447.500,-
3	Labuhan Batu	Rp. 450.000,-
4	Tapanuli Selatan	Rp. 392.500,-
5	Mandailing Natal	Rp. 381.500,-
6	Langkat kota	Rp. 330.000,-
7	Simalungun	Rp. 320.000,-
8	Langkat pinggir kota	Rp. 300.000,-

Bila seluruh biaya rutin perbulan di atas dijumlahkan, maka rata-rata belanja rutin yang harus dikeluarkan orangtua santri per tahun untuk anak-anak mereka yang *nyantri* pada MA pondok pesantren Sumatera Utara adalah sebagaimana tertera pada tabel 35 berikut:



Tabel 35: Rata-rata pengeluaran rutin orangtua santri MA pondok pesantren Sumatera Utara/ tahun

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Pengeluaran/ Pembiayaan (Rp)
1	Medan	Rp. 7.530.000,-
2	Deli Serdang	Rp. 5.370.000,-
3	Labuhan Batu	Rp. 5.400.000,-
4	Tapanuli Selatan	Rp. 4.710.000,-
5	Mandailing Natal	Rp. 4.578.000,-
6	Langkat kota	Rp. 3.960.000,-
7	Simalungun	Rp. 3.840.000,-
8	Langkat pinggir kota	Rp. 3.600.000,-

## BAB V

ANALISIS DAN DISKUSI  
HASIL PENELITIAN

## A. Sumber Dana Pembiayaan Pendidikan Pondok Pesantren di Sumatera Utara

Berdasarkan deskripsi data sebagaimana dipaparkan pada bab III dan IV terdahulu, dapat dikemukakan bahwa orangtua atau keluarga santri merupakan *funding* atau sumber utama bagi pembiayaan penyelenggaraan pendidikan pada pondok pesantren di Sumatera Utara. Untuk jenjang MTs, posisi pertama besarnya kontribusi orangtua tersebut ditempati oleh pondok pesantren kabupaten Deli Serdang, yaitu sebesar 92,03%, kemudian diikuti berturut-turut oleh pondok pesantren kabupaten Tapanuli Selatan sebesar 91,49%, kabupaten Langkat sebesar 91,40% (pesantren pinggir kota), kota Medan sebesar 88,3%, kabupaten Langkat sebesar 86,89% (pesantren kota), kabupaten Simalungun sebesar 71,78%, dan di posisi terakhir ditempati oleh pondok pesantren kabupaten Madina dengan kontribusi orangtua sebesar 41,97%.

Berkaitan dengan sumber pembiayaan dari pemerintah, MTs pondok pesantren yang paling banyak



menerima dana pemerintah adalah kabupaten Madina, yaitu sebesar 57,51%, diikuti kemudian oleh kabupaten Labuhan Batu sebesar 9,86%, kota Medan sebesar 9,25%, pesantren kota di kabupaten Langkat sebesar 8,54%, kabupaten Tapanuli Selatan sebesar 8,51%, kabupaten Simalungun sebesar 4,86%, dan akhirnya Deli Serdang sebesar 0,87%. Dari hasil wawancara dengan para pimpinan pondok pesantren diketahui bahwa seluruh dana yang diterima pondok pesantren dari pemerintah tersebut berasal dari satu sumber, yaitu Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Karenanya, perlu digarisbawahi bahwa sumber dana yang berasal dari pemerintah dalam bentuk dana BOS baru diterima dan dimanfaatkan MTs pondok pesantren sejak diberlakukannya kebijakan kompensasi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk pendidikan. Itu berarti bahwa besarnya kontribusi pemerintah sebagaimana dipaparkan di atas baru diterima MTs pondok pesantren sekitar dua tahun ini.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa besarnya kontribusi pemerintah dalam keikutsertaannya membiayai pendidikan pada MTs pondok pesantren berkaitan erat dengan besarnya jumlah santri yang belajar pada satu MTs pondok pesantren. Artinya, semakin besar jumlah santri pada satu MTs pondok pesantren, maka semakin besar

persentase dana yang diterimanya dari pemerintah. Karena itu, dana yang diterima MTs pondok pesantren kabupaten Madina, khususnya Musthafawiyah Purbabaru, yang secara kuantitatif paling besar dibanding MTs pondok pesantren lainnya adalah dikarenakan jumlah santrinya yang lebih banyak, yakni 7592 orang (terdiri dari 4530 laki-laki dan 3062 perempuan). Berdasarkan kenyatannya ini, dapat dikemukakan bahwa sampai saat ini belum ada kebijakan pemerintah yang bersifat terencana, sistematis, dan berkelanjutan, baik pemerintah pusat maupun daerah, dalam membantu pondok pesantren Sumatera Utara untuk membiayai pendidikannya.

Selain orangtua dan pemerintah, sumber pembiayaan MTs pondok pesantren Sumatera Utara juga berasal dari sumber usaha mandiri dan *waqaf* donatur. Sebagaimana telah dipaparkan pada bab III, usaha mandiri pesantren antara lain terdiri dari koperasi, perkebunan, peternakan dan usaha lainnya seperti fotocopy dan perbengkelan. Berdasarkan penelitian lapangan diketahui bahwa pondok pesantren yang tidak memiliki usaha mandiri hanyalah pondok pesantren yang berada di kabupaten Tapanuli Selatan. Sedangkan satu-satunya pondok pesantren yang mendapatkan sumber dana dari *waqaf* donatur adalah



pondok pesantren Luqman yang berada di kabupaten Simalungun.

Berdasarkan wawancara dengan para pimpinan pondok pesantren diketahui bahwa semua pesantren sebenarnya pernah menerima *infaq* atau *waqaf* dari para dermawan Muslim, baik dalam bentuk benda, seperti tanah atau sarana, maupun uang tunai, terutama pada masa-masa awal pendirian pondok pesantren. Namun saat ini, *infaq* atau *waqaf* tersebut tidak lagi diterima pondok pesantren secara rutin dan berkelanjutan, kecuali pada waktu-waktu tertentu ketika pondok pesantren mengalami kendala yang sangat serius dalam hal pembiayaan untuk menjamin kontinuitas kelembagaannya. Hal ini bagaimana dialami pondok pesantren Luqman di Kabupaten Simalungun dan Ma'had Darul Ikhlas di kabupaten Mandailing Natal. Dalam penuturannya, pimpinan pondok pesantren Luqman menyatakan bahwa *infaq* atau *waqaf*, khususnya dari keluarga pendiri pondok pesantren, merupakan sumber pembiayaan yang seringkali menyelamatkan dan memberikan garansi bagi kontinuitas pendidikan dan kelembagaan pondok pesantren yang dipimpinnya.

Dalam hal *infaq* atau *waqaf* ini, ada lagi satu kasus menarik yang peneliti temukan pada pondok pesantren Hidayatullah kabupaten Deli Serdang. Berdasar informasi

dari direktur pendidikan pesantren diketahui bahwa sampai saat ini pondok pesantren Hidayatullah sebenarnya masih banyak menggantungkan diri dari *funding infaq* atau *waqaf* masyarakat untuk membiayai pelaksanaan pendidikannya. Namun dermawan Muslim yang ber*infaq* atau ber*waqaf* tersebut tidak menginginkan nama dan jumlah dana yang diberikannya dicatat atau di*expose* kepada masyarakat luas. Karenanya, pimpinan pesantren Hidayatullah tidak bersedia memberikan data konkrit mengenai jumlah atau besaran dana yang diperoleh pondok pesantren ini dari *infaq* atau *waqaf* masyarakat. Satu-satunya informasi yang peneliti dapatkan dari pimpinan pesantren adalah bahwa jalan, asrama, sejumlah ruang belajar, bahkan beasiswa belajar mayoritas santri pondok pesantren Hidayatullah adalah merupakan sumbangan yang berasal dari dana *infaq* atau *waqaf* masyarakat atau dermawan Muslim tersebut.

Pada jenjang MA pondok pesantren, berdasar data sebagaimana tertera pada RAPBPP, diketahui bahwa sumber utama pembiayaan seluruh MA pondok pesantren Sumatera Utara juga berasal dari orangtua atau keluarga santri yang umumnya diperoleh dari dana SPP dan konsumsi. Dalam kasus ini, MA pondok pesantren kota Medan, kabupaten Deli Serdang, Labuhan Batu, dan Madina merupakan pesantren yang 100% sumber pembiayaannya



berasal dari dana SPP dan konsumsi santri yang dibayarkan orangtua setiap bulan ke pondok pesantren. Sedangkan untuk MA pondok pesantren kabupaten Simalungun, Tapanuli Selatan, dan Langkat (kota dan pinggir kota), selain orangtua atau keluarga santri, pondok pesantren memang menerima sumber dana dari pemerintah. Namun secara umum dapat dinyatakan bahwa kontribusi pemerintah untuk pondok pesantren pada tiga kabupaten/kota tersebut masih tergolong rendah, yaitu berturut-turut sebesar 8,45%, 6,51%, 6,37% dan 5,28%.

Bila sumber dana orangtua atau keluarga santri dirinci, MA pondok pesantren kota Medan menempati ranking pertama sebagai pesantren yang paling banyak menerima dana dari orangtua atau keluarga santri, yaitu rata-rata sebesar Rp. 2.747.010.000,-/ tahun. Posisi ini kemudian diikuti oleh MA pondok pesantren kabupaten Deli Serdang, yaitu rata-rata sebesar Rp. 1.687.140.000,-/ tahun, kabupaten Labuhan Batu sebesar Rp. 1.185.000.000,-/ tahun, kabupaten Madina sebesar Rp. 492.400.000,-/ tahun, kabupaten Tapanuli Selatan sebesar Rp. 491.400.000,-/ tahun, kabupaten Langkat dengan nominal Rp. 382.200.000,-/ tahun untuk tipologi pesantren kota dan Rp. 223.440.000,-/ tahun untuk pesantren pinggir kota, dan

akhirnya kabupaten Simalungun sebesar Rp. 147.840.000,-/ tahun.

Berbeda dengan MTs, dana pemerintah yang diterima MA pondok pesantren Sumatera Utara berasal dari dua sumber, yaitu: (1) bantuan khusus murid atau BKM, dan (2) dana RAPBD pemerintah kabupaten yang diterima secara rutin setiap tahun. Dalam konteks ini, MA pondok pesantren kota Medan, kabupaten Tapanuli Selatan, Simalungun, dan Langkat pinggir kota merupakan pesantren yang menerima dana pemerintah melalui BKM. Sedangkan satu-satunya MA pondok pesantren yang menerima dana pemerintah yang bersumber dari RAPBD pemerintah kabupaten adalah MA pondok pesantren Ulumul Qur'an yang berada di kabupaten langkat (kota). Kecuali untuk MA pondok pesantren kabupaten Langkat kota, data di atas menunjukkan bahwa pada dasarnya belum ada kebijakan khusus yang sifatnya terencana dan berkesinambungan dari pemerintah untuk membantu dan menjamin kemampuan MA pondok pesantren dalam membiayai pendidikannya. Dari satu sisi, hal itu setidaknya bisa dilihat dari belum meratanya akses pondok pesantren untuk mendapatkan bantuan dana BKM dari pemerintah. Sedangkan pada sisi lain, tampak bahwa belum semua pemerintah kabupaten/kota yang secara terencana dan berkesinambungan



mengalokasikan sebahagian dana RAPBD untuk membantu MA pondok pesantren dalam membiayai penyelenggaraan pendidikannya.

Di luar orangtua atau keluarga santri dan pemerintah, masing-masing MA pondok pesantren sebenarnya juga menerima suntikan dana dari sumber-sumber usaha mandiri pondok pesantren. Namun, berdasarkan penelitian lapangan yang dilakukan, diketahui bahwa tidak satupun MA pondok pesantren yang mencantumkan sumber usaha mandiri ini dalam RAPBPPnya. Semua dana yang diperoleh dari sumber hasil usaha pondok pesantren diadministrasikan ke dalam RAPBPP MTs pondok pesantren. Dalam wawancara dengan sejumlah pimpinan pondok pesantren didapati dua alasan mengapa sumber dana usaha mandiri ini diadministrasikan ke dalam RAPBPP MTs pondok pesantren. *Pertama*, sesuai dengan kebijakan pemerintah, fokus utama pendidikan pondok pesantren juga diarahkan pada upaya mensukseskan program wajib pendidikan dasar sembilan tahun. Karena itu, wajar saja jika dana yang diperoleh dari usaha mandiri pondok pesantren diprioritaskan pemanfaatan atau penggunaannya untuk menjamin pelaksanaan atau keberlangsungan pendidikan pada jenjang MTs. *Kedua*, pengadministrasian dana yang diperoleh dari usaha mandiri pondok pesantren ke RAPBPP

MTs pondok pesantren dilakukan dengan maksud untuk memudahkan sistem administrasi keuangan, pelaporan, dan pertanggung jawaban atau akuntabilitas publik. Karena itu, dalam tataran praktik, sebenarnya tidak semua dana yang diperoleh dari sumber hasil usaha pondok pesantren tersebut digunakan atau dibelanjakan sepenuhnya untuk membiaya pendidikan pada jenjang MTs.

Berdasarkan uraian di atas, bila seluruh persentase sumber pembiayaan pondok pesantren Sumatera Utara, baik untuk jenjang MTs maupun MA dirinci, maka kondisinya adalah sebagaimana diperlihatkan oleh tabel 36.1 dan 36.2 berikut



Tabel 36.2: Persentase sumber pembiayaan MA pondok pesantren Sumatera Utara/ tahun

Kabupaten Kota	Sumber Dana					
	Pemerintah	(%)	SPP/Konsumsi	(%)	lain-lain	(%)
Medan	-	-	2.747.010.000,-	100	-	-
Deli Serdang	-	-	1.687.140.000,-	100	-	-
Langkat	Kota	25.990.000,-	6,37	382.200.000,-	93,63	-
	Pinggir	12.480.000,-	5,28	223.440.000,-	94,47	-
Simalungun		13.650.000,-	8,45	147.840.000,-	91,55	-
Mandailing Natal		-	-	492.400.000,-	100	-
Labuhan Batu		-	-	1.185.000.000,-	100	-
Tapanuli Selatan		34.200.000,-	6,51	491.400.000,-	93,49	-

Tabel 36.1: Persentase sumber biaya pendidikan MTs pondok pesantren Sumatera Utara/ tahun

Kabupaten Kota	Sumber Dana					
	Pemerintah	(%)	SPP/Konsumsi	(%)	Lain-Lain	(%)
Medan	318.500.000.-	9,25	3.038.310.000.-	88,3	84.000.000,-	2,45
Deli Serdang	21.870.000.-	0,87	2.308.500.000.-	92,03	178.000.000.-	7,1
Langkat	Kota	66.366.867.-	8,54	676.200.000.-	86,89	4,57
	Pinggir	13.365.000.-	3,26	376.200.000.-	91,40	5,34
Simalungun		10.192.000.-	4,86	165.600.000.-	71,78	23,36
Mandailing Natal		418.280.500.-	57,51	301.125.000.-	41,40	1,09
Labuhan Batu		98.670.000.-	9,86	897.000.000.-	89,64	0,50
Tapanuli Selatan		64.350.000.-	8,51	691.400.000.-	91,49	-



Berdasar data-data di atas, dapat dikemukakan bahwa sampai saat ini, pemerintah ternyata belum berkontribusi besar bagi pendanaan atau pembiayaan pendidikan MA pondok pesantren. Dalam konteks MTs pondok pesantren pun, kontribusi pemerintah melalui pemberian dana BOS masih perlu dipertanyakan sampai kapan keberlanjutannya. Artinya, masih perlu dipertanyakan kebijakan pemerintah yang bersifat terencana, sistematis, dan berkelanjutan bagi memfunding pondok pesantren dalam menyelenggarakan pendidikannya.

Dari sisi lain, dengan tidak bermaksud menafikan eksistensi *infaq* atau *waqaf*, masyarakat luas (di luar orangtua atau keluarga santri) dan sumber-sumber *funding* pendidikan lain juga belum tampak belum begitu berkontribusi besar bagi membantu pondok pesantren dalam membiayai penyelenggaraan pendidikannya. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, pondok pesantren yang tampaknya masih kontiniu memperoleh dukungan dana atau pembiayaan dari masyarakat dalam bentuk *infaq* adalah pondok pesantren Hidayatullah yang berada di kabupaten Deli Serdang.

## B. Penggunaan atau Pemanfaatan Dana Pada Pondok Pesantren Sumatera Utara

Pada dasarnya semua pendapatan yang diperoleh pondok pesantren dari berbagai sumber pembiayaan sebagaimana telah diuraikan terdahulu dibelanjakan sesuai dengan keperluan pondok pesantren, khususnya untuk menjamin kontinuitas dan penyelenggaraan pendidikan yang baik pada masing-masing pondok pesantren. Dari hasil wawancara dengan pimpinan dan direktur keuangan pondok pesantren diketahui bahwa distribusi atau pengalokasian dana semata-mata digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pendidikan pada pondok pesantren. Dalam konteks itu, kebijakan yang digariskan pimpinan dalam penggunaan dana umumnya didasarkan atas prinsip-prinsip efektifitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Semua pondok pesantren yang distudi telah memiliki dokumen Rencana Anggaran dan Belanja Pondok Pesantren (RAPBPP) yang secara jelas dan rinci menerakan dengan baik rencana pendapatan, asal atau sumber-sumber pembiayaan (*revenue*), dan rencana pengeluaran atau belanja pondok pesantren.

Berdasarkan temuan lapangan dapat dikemukakan bahwa pondok pesantren bersikap terbuka dalam hal pembiayaan pendidikannya. Artinya, masalah keuangan



pondok pesantren bukan termasuk otoritas eksklusif yang menjadi 'rahasia' kyai atau pimpinan umum pondok pesantren. Masing-masing pondok pesantren yang distudi memiliki direktur atau bendahara yang *manage* keuangan pondok pesantren. Diduga kuat, kebijakan pemerintah yang mewajibkan transparansi dalam penggunaan dan pertanggung jawaban dana BOS dan BKM turut menstimulasi transparansi pengelolaan keuangan pondok pesantren, termasuk juga dalam menginformasikan hal-hal yang berkaitan dengan pembiayaan pendidikannya. Dari seluruh sampel studi, hanya ditemui sebuah pondok pesantren dimana pimpinannya kurang terbuka dalam memberikan informasi perihal pendanaan atau pembiayaan pondok pesantren. Ketika tim peneliti Pusat Penelitian IAIN Sumatera Utara turun ke lapangan, satu-satunya pondok pesantren yang tidak bersedia memberikan dokumen RAPBPPnya hanyalah pondok pesantren Raudlatul Hasanah yang berada di kota Medan. Menurut penuturan pimpinan pesantren, data yang tertera dalam RAPBPP tersebut merupakan dokumen rahasia pondok pesantren yang 'menyimpan' kekuatan dan kelemahan institusi pendidikannya. Karena itu, mereka tidak bersedia memaparkannya secara terbuka. Data-data tentang *unit cost* santri pondok pesantren Raudlatul Hasanah yang tersaji

dalam penelitian ini diperoleh sepenuhnya dari sumber angket, baik yang diisi oleh pimpinan satuan pendidikan maupun santri sendiri.

Berdasarkan data yang diperoleh, baik yang bersumber kepada RAPBPP maupun daftar isian atau *questionare*, diketahui bahwa terdapat dua kecenderungan utama dari penggunaan atau pemanfaatan dana pada seluruh pondok pesantren yang diteliti. *Pertama*, pondok pesantren yang lebih banyak membelanjakan dana yang berhasil dihimpun untuk keperluan non gaji, baik pada jenjang MTs maupun MA. *Kedua*, pondok pesantren yang pengeluarannya lebih banyak dibelanjakan untuk keperluan gaji.

Kecenderungan pertama merupakan fakta umum yang ditemui pada hampir seluruh pondok pesantren yang distudi, baik pada jenjang MTs maupun MA. Artinya, dari total dana yang dimiliki, umumnya lebih banyak digunakan pondok pesantren untuk membiayai komponen non gaji. Sedangkan kecenderungan kedua hanya terjadi pada pondok pesantren kabupaten Madina, dimana belanja gaji merupakan komponen pembiayaan terbesar dari total belanja pondok pesantren.

Dari enam wilayah sampel area, yaitu kota Medan, kabupaten Deli Serdang, Langkat, Simalungun, Labuhan Batu, dan Tapanuli Selatan, seluruh pondok pesantren



umumnya lebih banyak mengeluarkan belanja untuk membiayai komponen non gaji. Termasuk ke dalam belanja komponen non gaji ini adalah biaya KBM, belanja ATK, langganan daya dan jasa, pemeliharaan dan perawatan gedung/ sarana pembelajaran, pembinaan dan peningkatan kualitas guru, konsumsi santri-guru, pemberian insentif guru, dan pembiayaan kegiatan ekstra kurikuler serta porseni. Untuk semua item komponen non gaji ini, MTs pondok pesantren kabupaten Deli Serdang menempati posisi pertama dengan persentase belanja sebesar 81,38% dari seluruh pengeluaran pondok pesantren. Posisi tersebut berturut-turut ditempati oleh MTs pondok pesantren kabupaten Langkat (kota) dengan persentase belanja sebesar 80,89%, kota Medan sebesar 74,57%, kabupaten Langkat (pinggir kota) sebesar 72,29%, Simalungun sebesar 59,30%, Lanuhan Batu sebesar 55,08%, dan akhirnya Tapanuli Selatan dengan persentase belanja komponen non gaji sebesar 54,69%.

Berdasarkan data sebagaimana disajikan pada bab IV diketahui pula bahwa untuk MA pondok pesantren, belanja terbesar pertama untuk komponen non gaji ini juga ditempati oleh pondok pesantren kabupaten Deli Serdang, dengan persentase pengeluaran sebesar 69,89% dari total belanja pondok pesantren. Posisi tersebut berturut-turut

ditempati oleh MA pondok pesantren kota Medan, kabupaten Langkat (kota), Simalungun, Langkat (pinggir kota), Tapanuli Selatan, dan akhirnya Labuhan Batu.

Dalam kasus pondok pesantren kabupaten Madina, baik pada jenjang MTs maupun MA, pengeluaran terbesar pondok pesantren adalah untuk membiayai komponen gaji pimpinan, guru, staf, dan seluruh personalia pondok pesantren. Untuk jenjang MTs, sebanyak 71,30% dana yang diperoleh dibelanjakan untuk membiayai komponen gaji dan sisanya sebesar 28,70 untuk belanja non gaji. Kemudian, untuk jenjang MA, sebanyak 77,83% dana yang diperoleh pondok pesantren dibelanjakan untuk membiayai komponen gaji dan selebihnya, yakni 21,17% untuk komponen non gaji

Hemat peneliti, besarnya belanja untuk komponen gaji pada pondok pesantren kabupaten Madina disebabkan besarnya jumlah guru dan staf personil yang mengelola atau *manage* penyelenggaraan pendidikan pada pesantren ini. Dalam kasus pondok pesantren Musthafawiyah Purbabaru Madina, setiap bulannya pondok pesantren harus membayar gaji guru dan personil pesantren yang seluruhnya berjumlah 175 orang. Pada sisi lain, sama halnya dengan Ma'had Darul Ikhlas Dalan Lidang kabupaten Madina, pondok pesantren Musthafawiyah Purbabaru tidak mengeluarkan belanja untuk konsumsi santri-guru dikarenakan biaya komponen ini



umumnya lebih banyak mengeluarkan belanja untuk membiayai komponen non gaji. Termasuk ke dalam belanja komponen non gaji ini adalah biaya KBM, belanja ATK, langganan daya dan jasa, pemeliharaan dan perawatan *gedung/ sarana* pembelajaran, pembinaan dan peningkatan kualitas guru, konsumsi santri-guru, pemberian insentif guru, dan pembiayaan kegiatan ekstra kurikuler serta *porseni*. Untuk semua item komponen non gaji ini, MTs pondok pesantren kabupaten Deli Serdang menempati posisi pertama dengan persentase belanja sebesar 81,38% dari seluruh pengeluaran pondok pesantren. Posisi tersebut berturut-turut ditempati oleh MTs pondok pesantren kabupaten Langkat (kota) dengan persentase belanja sebesar 80,89%, kota Medan sebesar 74,57%, kabupaten Langkat (pinggir kota) sebesar 72,29%, Simalungun sebesar 59,30%, Lanuhan Batu sebesar 55,08%, dan akhirnya Tapanuli Selatan dengan persentase belanja komponen non gaji sebesar 54,69%.

Berdasarkan data sebagaimana disajikan pada bab IV diketahui pula bahwa untuk MA pondok pesantren, belanja terbesar pertama untuk komponen non gaji ini juga ditempati oleh pondok pesantren kabupaten Deli Serdang, dengan persentase pengeluaran sebesar 69,89% dari total belanja pondok pesantren. Posisi tersebut berturut-turut

ditempati oleh MA pondok pesantren kota Medan, kabupaten Langkat (kota), Simalungun, Langkat (pinggir kota), Tapanuli Selatan, dan akhirnya Labuhan Batu.

Dalam kasus pondok pesantren kabupaten Madina, baik pada jenjang MTs maupun MA, pengeluaran terbesar pondok pesantren adalah untuk membiayai komponen gaji pimpinan, guru, staf, dan seluruh personalia pondok pesantren. Untuk jenjang MTs, sebanyak 71,30% dana yang diperoleh dibelanjakan untuk membiayai komponen gaji dan sisanya sebesar 28,70 untuk belanja non gaji. Kemudian, untuk jenjang MA, sebanyak 77,83% dana yang diperoleh pondok pesantren dibelanjakan untuk membiayai komponen gaji dan selebihnya, yakni 21,17% untuk komponen non gaji

Hemat peneliti, besarnya belanja untuk komponen gaji pada pondok pesantren kabupaten Madina disebabkan besarnya jumlah guru dan staf personil yang mengelola atau *memanage* penyelenggaraan pendidikan pada pesantren ini. Dalam kasus pondok pesantren Musthafawiyah Purbabaru Madina, setiap bulannya pondok pesantren harus membayar gaji guru dan personil pesantren yang seluruhnya berjumlah 175 orang. Pada sisi lain, sama halnya dengan Ma'had Darul Ihklas Dalan Lidang kabupaten Madina, pondok pesantren Musthafawiyah Purbabaru tidak mengeluarkan belanja untuk konsumsi santri-guru dikarenakan biaya komponen ini



ditanggung atau dibelanjakan sendiri oleh santri dan guru. Karenanya, dana pondok pesantren banyak disedot oleh belanja gaji guru dan personil pondok pesantren. Rincian persentase pengeluaran pondok pesantren Sumatera Utara untuk komponen gaji dan non gaji ini bisa dilihat pada tabel 37 berikut:

Tabel 37: Persentasi pengeluaran pondok pesantren Sumatera Utara berdasarkan komponen gaji dan non gaji/ tahun

Tk. Pendidikan Kabupaten/Kota	Komponen Pengeluaran (Rp)			
A. Tsanawiyah	Gaji	%	Non Gaji	%
- Madina	493.100.000,-	71,30	198.520.500,-	28,70
- Tapanuli Selatan	325.100.000,-	45,31	392.325.000,-	54,69
- Labuhan Batu	440.500.000,-	44,92	540.120.000,-	55,08
- Simalungun	90.144.800,-	40,70	131.348.000,-	59,30
- Langkat (p. kota)	112.608.000,-	27,71	293.715.000,-	72,29
- Medan	769.935.000,-	25,43	2.256.870.000,-	74,57
- Langkat (kota)	141.685.200,-	19,11	600.002.000,-	80,89
- Deli Serdang	448.000.000,-	18,62	1.957.110.000,-	81,38
B. Aliyah				
- Madina	378.500.000,-	77,83	107.800.000,-	21,17
- Tapanuli Selatan	250.100.000,-	48,19	268.855.000,-	51,81
- Labuhan Batu	235.000.000,-	49,47	240.080.000,-	50,53
- Simalungun	58.775.000,-	36,89	100.550.000,-	63,11
- Langkat (p. kota)	86.250.000,-	38,58	137.300.000,-	61,41
- Medan	847.500.000,-	31,48	1.845.260.000,-	68,52
- Langkat (kota)	139.700.000,-	34,95	260.120.000,-	65,05
- Deli Serdang	477.830.000,-	30,11	1.109.310.000,-	69,89

### C. Persentase Belanja Orangtua atau Keluarga Santri

Pada awal tahun ajaran ketika anak masuk ke pondok pesantren, setidaknya lebih dari dua puluh item pembiayaan yang harus didanai orangtua. Dari seluruh item tersebut, komponen biaya uang pangkal, konsumsi, belanja pakaian, pembelian kitab, uang saku, SPP, pembelian buku dan alat pembelajaran serta biaya pondokan merupakan komponen yang membutuhkan dana yang cukup besar. Untuk jenjang MTs, rata-rata orangtua harus mengeluarkan dana sebesar Rp. 1.213.000,- (terendah) sampai Rp. 3.383.000,- (tertingi). Kemudian, untuk jenjang MA, rata-rata orangtua harus mengeluarkan dana sebesar Rp. 1.326.500,- (terendah) sampai Rp. 3.433.000,- (tertingi). Berdasarkan data ini, tampaknya biaya yang dibutuhkan seorang anak ketika masa awal masuk pondok pesantren hampir sama atau bahkan mungkin lebih tinggi dari biaya masuk ke perguruan tinggi.

Dalam konteks biaya rutin bulanan, bila ditilik dari besarnya persentase dana yang harus dikeluarkan orangtua santri, kecuali kabupaten Langkat (pesantren pinggir kota) dan Tapanuli Selatan, maka komponen lain-lain di luar SPP dan konsumsi selalu menempati rangking pertama belanja orangtua setiap bulan. Komponen lain-lain tersebut mencakup uang saku, biaya pondokan, cuci pakaian, dan



transportasi. Sedangkan untuk kabupaten Langkat (pesantren pinggir kota) dan Tapanuli Selatan, biaya konsumsi merupakan komponen belanja terbesar yang harus dibiayai orangtua secara rutin setiap bulan. Namun, ada juga kasus dimana belanja konsumsi dan komponen lain-lain sama besarnya. Hal ini dapat dilihat pada MTs pondok pesantren kabupaten Labuhan Batu dan MA pondok pesantren kabupaten Madina. Begitupun, terdapat kecenderungan kuat bahwa konsumsi santri merupakan komponen belanja terbesar yang harus dibayar para orangtua yang menyekolahkan anaknya ke pondok pesantren luar kota Medan. Sedangkan bagi orangtua yang menyekolahkan anaknya ke pondok pesantren kota Medan, uang saku menempati urutan pertama terbesar yang secara rutin harus dibayar orangtua setiap bulan.

Meskipun secara kuantitatif jumlah biaya yang dibelanjakan para orangtua santri MTs pondok pesantren kota Medan lebih besar, namun dari sudut persentase biaya yang harus dikeluarkan orangtua santri rata-rata/ bulan ternyata lebih besar pada pondok pesantren pinggir kota bila dibanding dengan pondok pesantren kota Medan. Untuk jenjang MTs, pengeluaran terbesar orangtua/ bulan adalah biaya konsumsi. Dalam hal ini, pondok pesantren yang menempati rangking pertama adalah pondok pesantren

pinggir kota di kabupaten Langkat, yaitu sebesar 60,71%, diikuti secara berturut-turut oleh kabupaten Tapanuli Selatan sebesar 49,38%, Madina sebesar 48,00%, Deli Serdang sebesar 43,85%, Langkat kota sebesar 42,62%, dan di posisi akhir Simalungun sebesar 40,32%. Khusus pondok pesantren kota Medan, pengeluaran terbesar orangtua santri per bulan ada pada komponen lain-lain, yaitu sebesar 50,63%. Begitupun, pada jenjang MTs, pengeluaran rata-rata orangtua/ bulan untuk keperluan lain-lain juga lebih besar pada pondok pesantren pinggir kota dibanding pondok pesantren kota Medan. Dalam kasus ini, pondok pesantren pinggir kota di kabupaten Simalungun menempati rangking pertama, yaitu sebesar 51,62%.

Sama halnya dengan jenjang MTs, pada jenjang MA, untuk konsumsi, rata-rata persentase belanja orangtua/ bulan juga lebih besar pada pondok pesantren pinggir kota bila dibanding dengan pondok pesantren kota Medan. Dalam hal ini, posisi tertinggi ditempati oleh pondok pesantren pinggir kota di kabupaten Langkat, yaitu sebesar 56,67% diikuti oleh Tapanuli Selatan sebesar 50,96%, dan Labuhan Batu sebesar 44,44%. Sedangkan untuk keperluan lain-lain, seperti biaya transportasi, uang saku, dan sebagainya, rangking pertama tertinggi persentase belanja orangtua/ bulan ditempati oleh MA pondok pesantren kabupaten



Simalungun (50,01%). Posisi tersebut berturut-turut diikuti MA pondok pesantren kota Medan (49,40%), kabupaten Madina (47,18%), Langkat kota (46,97%), Tapanuli Selatan (45,22%), Labuhan Batu (44,44%), Deli Serdang (42,47%), dan akhirnya Langkat pingir kota (36,66%).

Begitu pun, secara kuantitatif, bila seluruh pengeluaran rutin per bulan orangtua dijumlahkan, tampak dengan jelas bahwa pengeluaran rutin yang harus dibelanjakan orangtua ke pondok pesantren kota Medan lebih besar bila dibanding dengan pondok pesantren luar kota Medan. Secara rinci pengeluaran rutin bulanan orangtua santri MTs dan MA pondok pesantren Sumatera Utara berdasarkan komponen SPP, konsumsi, dan lain-lain tersebut dapat dilihat pada tabel 38.1 dan 38.2 berikut:

Kabupaten Kota	Alokasi Dana						
	SPP	(%)	Konsumsi	(%)	Lain-Lain	(%)	
Medan	110.000,-	17,95	192.500,-	31,42	310.000,-	50,63	
Deli Serdang	50.000,-	11,69	187.500,-	43,85	190.000,-	44,46	
Langkat	Kota	45.000,-	14,75	130.000,-	42,62	130.000,-	42,63
	Pinggir	20.000,-	7,14	170.000,-	60,71	90.000,-	32,15
Simalungun		25.000,-	8,06	125.000,-	40,32	160.000,-	51,62
Mandailing Natal		15.000,-	4,00	180.000,-	48,00	180.000,-	48,00
Labuhan Batu		50.000,-	11,24	200.000,-	44,94	195.000,-	43,82
Tapanuli Selatan		10.000,-	2,47	200.000,-	49,38	195.000,-	48,15

Tabel 38.1: Persentase pengalokasian dana yang dikeluarkan orangtua santri MTs pondok pesantren Sumatera Utara/ bulan



#### D. Besaran *Unit Cost* Konsumsi Harian dan Belanja Per Bidang Studi

Pada prinsipnya, belanja wajib yang secara kontiniu harus tetap ada dan tersedia bagi kontinuitas pendidikan santri pada suatu pondok pesantren adalah menyangkut dua komponen pokok, yaitu dana konsumsi harian dan SPP. Hal ini bukan bermaksud menyatakan bahwa biaya komponen lain di luar kedua komponen ini tidak penting, tetapi dari sudut urgensinya bagi keberlanjutan pendidikan santri, maka biaya konsumsi harian dan SPP merupakan biaya wajib yang harus ada dan dibayarkan orangtua atau keluarga santri ke pondok pesantren.

Berapakah besaran riil *unit cost* santri pondok pesantren Sumatera Utara per hari untuk komponen kedua komponen ini?. Berdasarkan data sebagaimana dipaparkan terdahulu, bila dihitung besaran riil rata-rata *unit cost* santri untuk konsumsi perhari, maka rangking *pertama* ditempati secara bersama oleh pondok pesantren kabupaten Deli Serdang dan Labuhan Batu, yaitu sebesar Rp. 6666,67,-, posisi *kedua* ditempati pondok pesantren kota Medan dengan nominal Rp. 6.416,66,-, posisi *ketiga* ditempati oleh pondok pesantren kabupaten Deli Serdang dengan nominal Rp. 6.250,-, posisi *keempat* ditempati pondok pesantren

Tabel 38.2: Persentase pengalokasian dana yang dikeluarkan orangtua santri MA pondok pesantren Sumatera Utara/ bulan

Kabupaten Kota	Alokasi Dana				
	SPP	(%)	Konsumsi	(%)	Lain-Lain (%)
Medan	125.000,-	19,92	192.500,-	30,68	310.000,- 49,40
Deli Serdang	70.000,-	15,64	187.500,-	41,89	190.000,- 42,47
Langkat	45.000,-	13,64	130.000,-	39,39	155.000,- 46,97
		6,67	170.000,-	56,67	110.000,- 36,66
Pinangir	20.000,-	6,67	170.000,-	56,67	110.000,- 36,66
Simalungun	35.000,-	10,93	125.000,-	39,06	160.000,- 50,01
Mandailing Natal	21.500,-	5,64	180.000,-	47,18	180.000,- 47,18
Labuhan Batu	50.000,-	11,12	200.000,-	44,44	200.000,- 44,44
Tapianuli Selatan	15.000,-	3,82	200.000,-	50,96	177.500,- 45,22



kabupaten Madina dengan nominal Rp. 6.000,-, posisi *kelima* dan *keenam* ditempati oleh pondok pesantren kabupaten Langkat dengan nominal Rp. 5.666,67,- (pinggir kota) dan Rp. 4.333,33 (kota), dan posisi *ketujuh* atau terakhir ditempati oleh pondok pesantren kabupaten Simalungun dengan nominal sebesar Rp. 4.166,67,-.

Secara rinci besaran riil unit cost santri untuk konsumsi harian ini bisa dilihat pada tabel 39.

Tabel 39: Unit Cost Konsumsi/Makan-Minum Santri MTs/MA Pondok Pesantren Sumatera Utara/ hari (30 hari)

Kabupaten Kota		Unit Cost Santri (Rp)	
		Biaya Konsumsi Perbulan	Rata-Rata Unit Cost Perhari
Medan		192.500,-	6.416,66,-
Deli Serdang		187.500,-	6.250,-
Langkat	Kota	130.000,-	4.333,33,-
	Pinggir	170.000,-	5.666,67,-
Simalungun		125.000,-	4.166,67,-
Mandailing Natal		180.000,-	6.000,-
Labuhan Batu		200.000,-	6.666,67,-
Tapanuli Selatan		200.000,-	6.666,67,-

Kemudian, bila dihitung besaran riil *unit cost* santri MTs podok pesantren Sumatera Utara per bidang studi per bulan, maka biaya tertinggi pertama ditempati oleh pondok pesantren kota Medan, yaitu dengan nominal sebesar Rp. 7.857,14,-, kemudian posisi tertinggi *kedua* ditempati secara bersama oleh pondok pesantren kabupaten Deli Serdang dan Labuhan Batu dengan nominal sebesar Rp. 3.571,42,-, posisi *ketiga* ditempati pondok pesantren kota di kabupaten Langkat dengan nominal sebesar Rp. 3.214,28,-, posisi *keempat* ditempati pondok pesantren Simalungun dengan nominal sebesar Rp. 1.785,71,-, posisi *kelima* ditempati pondok pesantren pinggir kota di kabupaten Langkat dengan nominal sebesar Rp. 1.428,57,-, posisi *keenam* ditempati pondok pesantren kabupaten Madina dengan nominal sebesar Rp. 1.071,42,- dan posisi *ketujuh* ditempati pondok pesantren kabupaten Tapanuli Selatan dengan nominal sebesar Rp. 714,28,-.

Sama halnya dengan MTs, untuk jenjang MA, rata-rata *unit cost* santri per bidang studi per bulan rangking tertinggi juga ditempati oleh MA pondok pesantren kota Medan dengan nominal sebesar Rp. 8928,57,-. Posisi berikutnya secara berturut-turut ditempati oleh pondok pesantren kabupaten Deli serdang dengan nominal sebesar Rp. 5000,-, pondok pesantren kabupaten Labuhan Batu dengan nominal



sebesar Rp. 3571,42,-, pondok pesantren kabupaten Langkat dengan nominal sebesar Rp. 3214,71,- (pesantren kota), pondok pesantren kabupaten Simalungun dengan nominal sebesar Rp. 2500,-, pondok pesantren kabupaten Madina dengan nominal sebesar Rp. 1535,71,-, pondok pesantren kabupaten Langkat (pinggir kota) dengan nominal sebesar Rp. 1428,57,-, dan akhirnya pondok pesantren kabupaten Tapanuli Selatan dengan nominal sebesar Rp. 1071,42,-. Secara rinci data tentang hal ini bisa disarikan ke dalam tabel 40 berikut:

Tabel 40: Besaran unit cost santri per bidang studi/ bulan (jenjang MTs dan MA)

Kabupaten Kota	Unit Cost Siswa			
	Jenjang MTs		Jenjang MA	
	SPP Perbulan	Rata-Rata Unit Cost/ bid. Studi (Rp)	SPP Perbulan	Rata-Rata Unit Cost/ bid. Studi (Rp)
Medan	110.000,-	7.857,14,-	125.000,-	8.928,57,-
Deli Serdang	50.000,-	3.571,42,-	70.000,-	5.000,-
Langkat	Kota	45.000,-	45.000,-	3.214,28,-
	Pinggir	20.000,-	20.000,-	1.428,57,-
Simalungun	25.000,-	1.785,71,-	35.000,-	2.500,-
Mandailing Natal	15.000,-	1.071,42,-	21.500,-	1.535,71,-
Labuhan Batu	50.000,-	3.571,42,-	50.000,-	3.571,42,-
Tapanuli Selatan	10.000,-	714,28,-	15.000,-	1.071,42,-



### E. Diskusi Hasil Penelitian

Secara khusus penelitian ini menemukan bahwa kontribusi pemerintah dalam pembiayaan pendidikan pada pondok pesantren masih relatif rendah. Berdasarkan *revenue* atau sumber biaya pendidikan pondok pesantren Sumatera Utara sebagaimana tertera dalam RAPBPP, baik untuk jenjang MTs maupun MA, orangtua atau keluarga santri merupakan penyedia utama terbesar yang banyak menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan pondok pesantren di Sumatera Utara. Pada jenjang MTs, kontribusi orangtua atau keluarga santri bahkan mencapai 92,03% dari total sumber pembiayaan pendidikan pondok pesantren. Sedangkan pada jenjang MA, pada pondok pesantren kota Medan, kabupaten Deli Serdang dan Labuhan Batu, kontribusi orangtua atau keluarga santri bahkan mencapai 100%.

Bila dilihat secara kuantitatif, persentase tertinggi kontribusi pemerintah dalam membiayai pendidikan pondok pesantren di Sumatera Utara baru mencapai 9,86% untuk tingkat MTs dan 8,45% untuk jenjang MA. Dalam hal ini memang ada pengecualian, yaitu kontribusi pemerintah untuk MTs pondok pesantren kabupaten Madina dapat dikatakan tergolong tinggi, khususnya Musthafawiyah

Purbabaru, yang mencapai 57,51%. Namun pengecualian ini pun harus dengan catatan, yaitu jumlah dana yang diterima MTs pondok pesantren dari pemerintah hanya berasal dari satu sumber, yakni dana BOS. Dikarenakan jumlah santri pada pondok pesantren Musthafawiyah Purbabaru mencapai 5792 orang, maka otomatis besarnya dana BOS yang diterima pondok pesantren ini paling besar diantara seluruh pondok pesantren yang di studi. Sedangkan dalam kasus pondok pesantren lainnya, dikarenakan jumlah santri yang relatif sedikit, maka mereka hanya menerima dana BOS yang jumlahnya relatif kecil.

Ada beberapa catatan untuk temuan penelitian ini, *Pertama*, hasil penelitian ini tidak jauh berbeda dengan temuan penelitian sebelumnya yang menemukan bahwa kontribusi pemerintah memang lebih kecil bila dibanding dengan orangtua dalam membiayai penyelenggaraan pendidikan. Penelitian yang dilakukan Dedi Supriadi tentang satuan biaya pendidikan dasar dan menengah pada lembaga pendidikan negeri di Indonesia menemukan bahwa bila dihitung total biaya per siswa yang memungkinkan mereka dapat mengikuti proses pendidikan di sekolah, peran pemerintah dalam pembiayaan pendidikan hanya meliputi 19-30%, sedangkan dana masyarakat (selain orangtua) dan sumbangan lainnya hanya memberikan kontribusi 1-4%.



Karenanya, sebahagian besar, yaitu 68-80% biaya pendidikan ditanggung orangtua.<sup>1</sup> Kesimpulan yang sama sebelumnya juga pernah ditemukan SMERU dan Bank Dunia dari hasil survainya tentang layanan pendidikan dasar pada lima kabupaten dan lima kota di Indonesia. Dengan tegas, hasil survei tersebut menyimpulkan bahwa jika dibandingkan dengan dana yang langsung diperoleh dari pemerintah, kontribusi orangtua murid cenderung lebih besar.<sup>2</sup>

Kedua, secara umum kontribusi institusi-institusi *funding* pendidikan lainnya juga masih sangat rendah. Sepertinya, tanggung jawab masyarakat (di luar orangtua), yayasan *funding* pendidikan, dan dunia usaha masih perlu dipertanyakan dalam keikutsertaan mereka mencerdaskan kehidupan bangsa secara menyeluruh. Padahal, sesuai dengan jiwa dan semangat konstitusi 1945 dan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, masyarakat (termasuk sektor swasta) seharusnya ikut bertanggung jawab

<sup>1</sup> Informasi dan analisis yang lebih mendalam lihat Dedi Supriadi, *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah* (Bandung: Remaja Rosdakarya), 2003.

<sup>2</sup> Lihat Nina Toyamah dan Syaikh Usman 'Alokasi Anggaran Pendidikan di Era Otonomi Daerah' Tersedia online di <http://www.smeru.or.id/report>. Diakses pada tanggal 4 Oktober 2006.

secara optimal dan berpartisipasi aktif dalam mem*funding* pondok pesantren untuk membiayai pendidikannya.

Berdasarkan point kedua di atas, temuan penelitian ini sepertinya semakin memperjelas terjadinya pergeseran sistem pembiayaan santri antara pondok pesantren masa lalu dengan masa kini. Pada masa lalu, terutama masa awal-awal kehadiran dan perkembangan pondok pesantren, eksistensi dan keberlanjutan pendidikan seorang santri atau penuntut ilmu umumnya bergantung pada *charitas* atau dana masyarakat, baik dalam bentuk *zakat*, *infaq*, *waqaf*, *shadaqah*, maupun berbagai bentuk pemberian ikhlas lainnya; atau dalam sejumlah kasus, di luar jam-jam belajar, para santri ikut mengelola atau menggarap sawah, ladang, atau kebun kyai yang tidak hanya sekedar menunjukkan darma baktinya pada sang kyai, tetapi hasil kerja mereka itu juga dipergunakan kyai untuk membiayai makan-minum dan penyelenggaraan pendidikan pada suatu pondok pesantren.

Ketiga, secara umum penelitian ini menemukan bahwa biaya studi pada pondok pesantren ternyata lebih besar dan lebih mahal bila dibandingkan dengan biaya studi pada lembaga persekolahan dan madrasah non pesantren. Dalam konteks ini, pada awal tahun ajaran, orangtua santri bahkan harus mengeluarkan dana yang jumlahnya lebih besar dari



dana yang dibutuhkan untuk masuk ke perguruan tinggi agama. Tidak hanya pada awal tahun ajaran, pada setiap bulannya orangtua juga harus mempersiapkan dana dalam jumlah yang relatif besar untuk membiayai keberlanjutan pendidikan anaknya di pondok pesantren. Pandangan yang menyatakan bahwa studi di pondok pesantren biayanya murah, sepertinya kini sudah mulai jauh bergeser. Dalam ukuran-ukuran tertentu, sepertinya pondok pesantren sedang bergerak ke arah pendidikan *exclusive* yang mahal. Fenomena belakangan ini semakin memperlihatkan bahwa pendidikan di pesantren sepertinya mudah dijangkau oleh keluarga yang status sosial-ekonominya tergolong tinggi. Sedangkan bagi keluarga yang kurang mampu secara ekonomis, cita dan harapan menyekolahkan anak ke pondok pesantren bisa jadi hanya merupakan 'angan' dan 'impian' belaka.

Keempat, fakta menarik dari temuan penelitian ini adalah alokasi atau distribusi dana atau anggaran pondok pesantren yang umumnya lebih banyak dihabiskan untuk belanja gaji dan konsumsi. Fakta ini pesis sama dengan hasil temuan penelitian sebelumnya, baik yang dilakukan Dedi SMERU dengan Bank Duia, maupun yang dilakukan Dedi Supriadi sebagaimana dikutip terdahulu. Dari sisi ini dapat ditafsirkan bahwa belanja pondok pesantren lebih dominan

diarahkan untuk menjamin eksistensi pesantren agar tetap *survive*. Karena itu, dapat dikemukakan bahwa pengeluaran menyangkut peningkatan kualitas guru, kualitas santri<sup>3</sup>, apalagi kualitas proses belajar mengajar, tampaknya masih merupakan skala prioritas yang masih 'jauh' untuk bisa dijangkau pondok pesantren. Meskipun korelat prestasi atau mutu pendidikan pondok pesantren tidak menjadi variabel yang turut dianalisis dalam penelitian ini, namun temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa pembiayaan pendidikan pondok pesantren belum menyentuh aspek mutu atau kualitas secara signifikan. Meski demikian, untuk membuktikan asumsi ini masih perlu dilakukan penelitian empirik yang bersifat ilmiah dan komprehensif.

<sup>3</sup> Pernyataan ini tidak berarti menafikan fakta bahwa terdapat sejumlah santri pondok pesantren yang hasil Ujian Nasionalnya (UN) lebih tinggi atau menyamai hasil UN siswa sekolah atau madrasah umum.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

#### A. Kesimpulan

Pada masa-masa awal kehadirannya, pondok pesantren mampu hidup dan berkembang dengan mengandalkan *charitas* dari komunitas Muslim yang setiap saat terus mengalir, baik dalam bentuk *zakat*, *waqaf*, *infaq*, *shadaqah*, dan lain-lain. Namun, dalam perkembangannya dewasa ini, sumber-sumber pembiayaan pondok pesantren sudah sangat variatif. Studi yang dilakukan terhadap 14 pondok pesantren yang tersebar pada tujuh propinsi Sumatera Utara ini menemukan bahwa secara umum terdapat lima sumber-sumber pembiayaan pondok pesantren, yaitu: (1) pemerintah, (2) orangtua atau keluarga santri, (3) yayasan, (4) *infaq* atau *waqaf* masyarakat, dan (5) usaha pondok pesantren.

Sumber pembiayaan yang berasal dari pemerintah terdiri dari dana BOS dan RAPBD pemerintah daerah. Dana yang berasal dari orangtua diperoleh pondok pesantren SPP dan konsumsi santri. Dana yang berasal dari yayasan diperoleh pondok pesantren dalam bentuk uang tunai yang umumnya diberikan pada saat-saat pondok pesantren mengalami masalah seirus dalam pembiayaan untuk kontinuitas kelembagaannya.

Kemudian dan *infaq* atau *waqaf* masyarakat diperoleh pondok pesantren dalam bentuk bantuan pengadaan gedung atau sarana dan uang tunai, seperti beasiswa belajar santri. Seangkan dana yang berasal dari usaha pondok pesantren diperoleh lewat usaha mandiri perkebunan, peternakan, koperasi, uasaha potocopy, perbengkelan, dan lain-lain.

Penelitian ini menemukan bahwa kontribusi pemerintah dan masyarakat (di luar orangtua atau keluarga santri) dalam keikutsertaan membiayai pendidikan pada pondok pesantren di Sumatera Utara masih tergolong rendah. Untuk jejang pendidikan MTs, kecuali MTs pesantren Musthafawiyah Madina, kontribusi tertinggi yang diberikan pemerintah baru mencapai angka 9,86%. Untuk jenjang MA bahkan lebih memprihatinkan, dimana kontribusi tertinggi yang diberikan pemerintah baru mencapai angka 8,45%.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa secara umum ada dua komponen utama yang dibiayai pondok pesantren, yaitu pengeluaran untuk membayar gaji dan non gaji. Bila dirinci, komponen non gaji mencakup tujuh komponen pengeluaran, yaitu: (1) belanja ATK, (2) langganan daya dan jasa, (3) kegiatan belajar-mengajar, (4) pemeliharaan/perawatan gedung dan sarana, (5) pembinaan dan peningkatan kualitas guru, (6) konsumsi santri dan guru, dan (7)



pengeluaran lain-lain seperti untuk biaya porseni, kegiatan ekstra kurikuler, dan insentif guru.

Dari seluruh pengeluaran di atas, belanja gaji dan konsumsi santri/guru merupakan komponen pembiayaan terbesar pertama dan kedua yang secara berkelanjutan dibiayai pondok pesantren. Di luar kedua komponen tersebut, secara berturut-turut pengeluaran yang dibiayai pondok pesantren adalah belanja untuk KBM, langganan daya dan jasa, peningkatan kualitas pendidik, dan komponen lainnya.

Dalam konteksnya dengan belanja orangtua atau keluarga santri, pada awal tahun ajaran, untuk jenjang MTs pondok pesantren terdapat 22 item pembiayaan yang harus dibiayai orangtua santi. Dari seluruh komponen tersebut, uang pangkal dan biaya konsumsi merupakan pengeluaran terbesar yang menempati posisi pertama dan kedua. Dari 22 item pembiayaan tersebut, rata-rata biaya yang dikeluarkan orangtua mencapai Rp. 1.213.000,- (belanja terendah) sampai Rp. 3.383.000,-. Belanja tertinggi ditempati oleh MTs pondok pesantren kota Medan dan terendah MTs pondok pesantren kabupaten Simalungun.

Tidak berbeda dengan itu, untuk jenjang MA juga terdapat dua puluh item pembiayaan yang harus didanai orangtua atau keluarga. Dari dua puluh item tersebut, uang pangkal, pembelian pakaian, pembelian kitab, dan konsumsi

merupakan komponen pembiayaan terbesar yang harus di biayai orangtua pada awal tahun ajaran. Rata-rata, orangtua harus membelanjakan sebesar Rp. 1.326.500,- (belanja terendah) sampai Rp. 3.433.000,- (belanja tertinggi). Sama halnya dengan jenjang MTs, biaya tertinggi dibayarkan orangtua yang mendaftarkan anaknya ke pondok pesantren kota Medan dan terendah ke pondok pesantren kabupaten Simalungun.

Berkaitan dengan belanja rutin bulanan, sedikitnya ada lima item pembiayaan yang harus didanai orangtua secara berkelanjutan, yaitu: (1) biaya SPP, (2) konsumsi, (3) bayar asrama atau pondokan, (4) uang saku santri, dan (5) cuci pakaian. Dari lima item tersebut, baik untuk jenjang MTs maupun MA, biaya tertinggi sampai terendah yang secara berturut-turut dibelanjakan orangtua ditempati oleh uang saku, konsumsi, SPP, biaya asrama/ pondokan, dan cuci pakaian. Rata-rata orangtua santri jenjang MTs mengeluarkan biaya sebesar Rp. 280.000,- (biaya terendah) sampai Rp. 612.500,- (biaya tertinggi) setiap bulannya. Belanja tertinggi bulanan dibayar orangtua yang menyekolahkan anaknya ke pondok pesantren kota Medan dan terendah ke pondok pesantren kabupaten Langkat untuk tipologi pesantren pinggir kota. Sedangkan untuk jenjang MA, rata-rata belanja rutin bulanan yang dibayarkan orangtua adalah sebesar Rp. 300.000,- (belanja terendah) sampai Rp. 627.500,- (belanja tertinggi).



Belanja tertinggi dibayarkan orangtua ke MA pondok pesantren kota Medan dan terendah ke MA pondok pesantren kabupaten Langkat untuk tipologi pesantren pinggir kota.

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun dari seluruh pondok pesantren, dapat dikemukakan bahwa rata-rata seorang santri harus mengeluarkan biaya antara Rp. 7857,14,- (belanja tertinggi) dan Rp. 714.28,- (belanja terendah) untuk *unitcost* satu bidang studi dari 14 bidang studi yang mereka pelajari di pondok pesantren. Sedangkan untuk konsumsi, rata-rata seorang santri harus membelanjakan antara Rp. 6416,66,- (tertinggi) dan Rp. 4166,67,- (terendah) untuk setiap harinya.

Berdasarkan data sebagaimana dideskripsikan dalam laporan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa sumber dana terbesar penyelenggaraan pendidikan pada pondok pesantren Sumatera Utara diperoleh atau berasal dari orangtua atau keluarga santri. Untuk jenjang MA pondok pesantren, kontribusi orangtua atau keluarga santri ini bahkan mencapai 100%. Karenanya, kontribusi pemerintah dalam keikutsertaannya membiayai pendidikan pondok pesantren dapat dinyatakan masih terolong rendah. Untuk jenjang MTs, kecuali pondok pesantren Musthafawiyah Purbabaru Madina, kontribusi tertinggi pemerintah baru mencapai 9,86% dan untuk jenjang MA baru sekitar 8,45%.

## B. Rekomendasi

Berdasarkan data dan kesimpulan hasil penelitian sebagaimana dipaparkan di atas, maka ada beberapa hal yang menjadi rekomendasi penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menjamin kontinuitas, pengembangan, dan peningkatan kualitas pendidikannya, seluruh pondok pesantren Sumatera Utara perlu menciptakan terobosan baru dalam mencari *channel of fund* dari berbagai *revenue* atau sumber-sumber pembiayaan pendidikan potensial dan memungkinkan. Upaya tersebut bisa dilakukan dengan berbagai cara. *Pertama*, merintis kembali pemberdayaan zakat umat Islam melalui zakat produktif di bidang pendidikan. *Kedua*, menjalin kemitraan atau kerjasama dengan para pengusaha atau dermawan Muslim dalam bentuk imbal jasa, seperti pondok pesantren menawarkan tenaga pembimbing atau penyuluh agama yang diperlukan masyarakat atau usahawan Muslim sementara itu para usahawan atau dermawan Muslim memberikan *fundingnya* ke pondok pesantren. *Ketiga*, merintis dan atau mengembangkan secara profesional unit-unit usaha mandiri pondok pesantren, baik perkebunan, peternakan, koperasi, perbengkelan, dan lain-lain. Untuk itu, pondok pesantren bisa menjalin kerjasama dengan para pengusaha Muslim



yang bergerak dalam bidang yang sama, baik dalam hal manajemen, pembiayaan, maupun pemasaran hasil-hasilnya. *Keempat*, melakukan diversifikasi pembiayaan melalui jalinan kerjasama dan permohonan bantuan atau pembiayaan kepada pengusaha atau dermawan Muslim Timur Tengah atau dengan perguruan-perguruan tinggi Islam di kawasan itu. Kepada para pengusaha atau dermawan Muslim, melalui persetujuan pemerintah *via* Departemen Agama, pondok pesantren bisa mengajukan bantuan pendanaan pendidikan, baik melalui hibah maupun pinjaman lunak jangka panjang. Sedangkan kepada perguruan-perguruan tinggi Islam di Timur Tengah, pondok pesantren bisa mengajukan permohonan bantuan tenaga pengajar atau kitab-kitab klasik yang banyak dibutuhkan santri untuk belajar di pondok pesantren.

2. Masyarakat Muslim, khususnya pengusaha dan dermawan, pada dasarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan umat. Untuk itu, sangat diperlukan partisipasi nyata dan kontribusi maksimal keikutsertaan mereka dalam membiayai pendidikan pondok pesantren. Sebagai *feedback*, para pengusaha atau dermawan Muslim bisa mengajukan permohonan bantuan tenaga pembimbing atau

penyuluh agama yang mereka perlukan dari pondok pesantren.

3. Mengingat masih rendahnya kontribusi pemerintah dalam pendanaan pendidikan pada pondok pesantren Sumatera Utara, maka melalui penelitian ini diharapkan: (1) pemerintah pusat melalui Departemen Agama RI hendaknya membuat kebijakan yang terprogram untuk meningkatkan bantuan pembiayaan pendidikan pondok pesantren secara berkesinambungan, (2) pemerintah daerah tingkat satu dan dua hendaknya mencantumkan secara eksplisit alokasi dana atau bantuan pembiayaan untuk mendanai penyelenggaraan pendidikan pada pondok pesantren dalam setiap RAPBDnya secara berkelanjutan, (3) pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah hendaknya menyediakan lahan atau hak bagi pengusahaan lahan untuk perintisan maupun pengembangan usaha mandiri pondok pesantren. Dalam kerangka ini, pemerintah perlu mengkaji secara serius penerapan konsep *land grand college* bagi kontinuitas pendidikan pada seluruh pondok pesantren di Sumatera Utara khususnya dan Indonesia umumnya.



## PUSTAKA ACUAN

- Dedi Supriadi dan Fasli jalal, 'Pendanaan Pendidikan di Indonesia dalam Dedi Supriadi dan Fasli Jalal (ed.), *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah* (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa), 2001.
- Dedi Supriadi, *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah* (Bandung: Remaja Rosdakarya), 2003.
- Ditjen PUOD, *Penelitian dan Pengkajian Satuan Biaya Sekolah Dasar* (Jakarta: Ditjen PUOD Departemen Dalam Negeri), 1993.
- D. Clark, et. al., *Financing Education in Indonesia* (Manila: ADB, 1998).
- James H. McMillan dan Sally Schumacher, *Research in Education: A Conceptual Introduction* (New York: Longman, 2001)
- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (ed.), *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LP3ES, 1989)
- Mintarsih Danumihardja, *Manajemen Keuangan Sekolah (Studi manajemen Keuangan SLTP dalam Implementasi otonomi Daerah* (Jakarta: Uhamka Press), 2004.
- Moch. Idoci Anwar, *Transformasi Biaya Pendidikan dalam Layanan Pendidikan pada Perguruan Tinggi Bandung* (Bandung: PPs IKIP Bandung), 1990.
- M. Fakhry Ghaffar, *Konsep dan Filosofi Biaya pendidikan* (Jakarta: Depdikbud, 1987).
- Nannag Fatah, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya), 2002.



Nina Toyamah dan Syaikh Usman 'Alokasi Anggaran Pendidikan di Era Otonomi Daerah' Tersedia online di <http://www.smeru.or.id/report> . Diakses pada tanggal 4 Oktober 2006.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 22 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Penjelasannya

Wagiman, *Pengelolaan Biaya Pendidikan dalam Menunjang Pelaksanaan Program Pengajaran di SD Negeri (studi Deskriptif tentang Pengelolaan Biaya Pendidikan di SD Negeri dalam Kodya Pekan Baru)*, Penelitian Tesis (Bandung: PPs IKIP Bandung), 1993.

World Bank, *Indonesia: Public Expenditures, Prices, and the Poor* (Washington DC: East Asia and Pacific Regional Office, Country Departemen III), 1993.

## KUESIONER

### Pengantar

Kuesioner ini digunakan untuk menghimpun data penelitian yang berjudul UNIT COST SANTRI PONDOK PESANTREN DI SUMATERA UTARA. Dalam rangka itu, kami menghaapkan kesediaan para pimpinan umum, kepala satuan pendidikan, dan bendahara/ direktur keuangan pondok pesantren untuk memberikan informasi sesuai dengan kondisi pesantren yang sesungguhnya. Data atau informasi yang diberikan tidak akan mengandung unsur penilaian atau berkaitan dengan kondukte pondok pesantren, tetapi hanya akan digunakan untuk menghimpun data yang akurat perihal *unit cost* santri dan sumber-sumber pembiayaan pondok pesantren di Sumatera Utara.

Kepada Yth. para pimpinan umum, kepala satuan pendidikan, dan bendahara/ direktur keuangan pondok pesantren dimohonkan kesediaannya untuk mengecek kembali pencatatan data yang telah dilakukan peneliti lapangan. Atas kerjasama dan bantuan yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

### Petunjuk Umum

Pencatatan data ke dalam kuesioner ini dilakukan oleh peneliti lapangan, jadi tidak meminta responden (kepala madrasah, bendahara direktur keuangan pesantren, *ustadz/ah*, atau santri). Semua data harap diisi di lapangan. Untuk memudahkan dalam pencatatan atau penghitungan data (seperti jumlah dana atau persentase), peneliti lapangan diharuskan membawa kalkulator kecil. Agar tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam pencatatan dan penjumlahan, disarankan agar data diverifikasi atau dikonfirmasi ulang kepada sumber data.

Perlu diingat bahwa validitas data yang dijamin sangat bergantung pada kecermatan peneliti lapangan dalam mencatat data dan mengkonfirmasinya kepada sumber data serta kejujuran intelektual dalam mencatatkan data apa adanya.

Kepada sumber data, peneliti lapangan perlu menjelaskan bahwa data atau informasi yang mereka berikan tidak mengandung unsur penilaian, baik terhadap kondukte pimpinan, *ustadz/ah*, pegawai, maupun



## Item Pertanyaan

1. Jumlah seluruh santri saat ini :
  - 1.1. tingkat menengah pertama/ MTs: .....
  - 1.2. tingkat menengah atas/ MA: .....

### 2. Jumlah santri berdasar jenjang pendidikan (tahun 2005/2006):

No	Jenjang	Kelas 1		Kelas 2		Kelas 3		Kelas 1		Kelas 2		Kelas 3		Total
		Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	
01	MT's													
02	MA													
Jumlah														

### 3. NEM santri baru yang masuk ke pesantren ini pada tahun 2005 lalu:

No.	N E M	JENJANG		
		M T's		MA
01.	Tertinggi			
02.	Terendah			
03.	Rata-Rata			

pondok pesantren secara umum. Perlu dijelaskan bahwa data atau informasi yang dijang hanya akan digunakan untuk menghitung besaran nilai unit cost santri dan sumber-sumber pembiayaan pondok pesantren di Sumatera Utara.

### Identitas Pesantren

- Nama Pesantren : .....
- Jenjang Pendidikan : .....
- Alamat Pesantren : .....
- Desa : .....
- Kecamatan : .....
- Kab/ Kota : .....
- Lokasi Pesantren :
  - (a) di ibukota kabupaten/kota
  - (b) di pinggiran kabupaten/kota
  - (c) di pedesaan\*

\* Beri tanda silang (X) pada salah satu huruf a, b, atau c



- 6.5. sekitar Rp. 1.001.000 s.d. Rp 1.500.000,-  
 6.6. sekitar Rp. 1.501.000 s.d. Rp. 2.000.000,-  
 6.7. lebih dari Rp. 2.000.000,-

7. Jumlah Ustadz/ Tuan Guru (sampai tahun 2006 ini):

No	Status	Jumlah		Total
		Laki-Laki	Perempuan	
01.	Guru tetap PNS (DPK)			
02.	Guru tetap Yayasan			
03.	Guru honorer			
04.	.....*			

\* tuliskan

8. Ratio atau perbandingan jumlah ustadz/ tuan guru dengan santri: ..... : .....  
 (misalnya 1:30, artinya seorang ustadz/ tuan guru rata-rata menangani 30 santri; caranya dengan membagi jumlah santri dengan jumlah ustadz/ tuan guru)

9. Jumlah pegawai/ tenaga administrasi pesantren (sampai tahun 2006):

- 9.1. Laki-laki: .....  
 9.2. Perempuan: .....

4. NEM lulusan Pesantren ini pada tahun 2005 lalu:

No.	N E M	JENJANG	
		M T s	MA
01.	Tertinggi		
02.	Terdah		
03.	Rata-Rata		

5. Pekerjaan orangtua/ wali santri:

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Total (%)
01.	Petani		
02.	Pedagang		
03.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)		
04.	ABRI		
05.	Pensiunan PNS/ ABRI		
06.	.....*		
Jumlah			

\* tuliskan

6. Perkiraan rata-rata penghasilan orangtua santri (ayah dan ibu) per bulan (beri tanda silang pada salah satu nomor):  
 6.1. kurang dari Rp. 250.000,-  
 6.2. sekitar Rp. 251.000 s.d. Rp 500.000,-  
 6.3. sekitar Rp. 501.000 s.d. Rp 750.000,-  
 6.4. sekitar Rp. 751.000 s.d. Rp 1.000.000,-



12. Dari total RAPBPP di atas, berapa kira-kira perbandingan antara dana yang bersumber dari santri/orangtua santri, pemerintah, dan sumber-sumber lainnya:

No	Sumber dana	2003/2004	2004/2005	2005/2006	Total (%)
		Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)	
1.	Santri/ orangtua santri				
2.	Pemerintah				
3.	Yayasan				
4.	Infag/ wakaf				
5.	Usaha pondok pesantren:				
	- Koperasi				
	- Perkebunan .....				
	- Peternakan .....				
	- .....				
Jumlah					

\* tuliskan

13. Bentuk bantuan yang diterima pesantren dari pemerintah selama 3 tahun belakangan ini:

No	Tahun	Bentuk bantuan	Jumlah
01	2003/2004	Uang (cash money) Bantuan sarana *	
		Lain-lain .....	**
02	2004/2005	Uang (cash money) Bantuan sarana *	
		Lain-lain .....	**

10. Sumber-sumber pembiayaan pesantren selama ini:

No	Sumber-Sumber Pembiayaan	Ada/tidak ada*	Jumlah (Rp)	%
01	Santri/ Orangtua santri			
02	Pemerintah			
03	Yayasan			
04	Infag/ wakaf			
05	Usaha pesantren:			
	a. Koperasi			
	b. Perkebunan .....			
	c. Peternakan .....			
	d. ....**			
Total				

\* tuliskan salah satu \*\* tuliskan jenis usaha

11. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pondok Pesantren (RAPBPP) pada 3 (tiga) tahun terakhir untuk keperluan gaji dan non gaji:

No	Tahun	Pendapatan (Rp)	Pengeluaran (Rp)			Total (Rp)
			Gaji	%	Non gaji	
1.	2003/2004					
2.	2004/2005					
3.	2005/2006					
Jumlah						



04	Bendahara			
05	Kepala asrama			
06	<i>Ustadz/</i> tuan guru			
07	Pegawai			
08	.....*			

\* tuliskan

16. Sistem penggajian *ustadz/* tuan guru:

No	Status	Sistem penggajian
01	Guru tetap PNS (DPK)	Per bulan/ per tahun *
02	Guru tetap Yayasan	Per bulan/ per tahun *
03	Guru honorer	Per bulan/ per tahun *
04	.....**	Per bulan/ per tahun *

\* coret salah satu

\*\* tuliskan

17. Sistem pembayaran SPP santri:

No	Bentuk pembayaran	Sistem pembayaran	Besaran/ jumlah
01	Uang kontan ( <i>cash money</i> )	Per bulan/ per tahun *	Rp.
02	Beras	Per bulan/ per tahun *	..... Kg/ kg*
03	Beasiswa	Per bulan/ per tahun *	Rp.
04	Dana BOS	Per bulan/ per tahun *	Rp.
04	.....**	Per bulan/ per tahun *	.....

\* coret salah satu

\*\* tuliskan

03	2005/2006	Uang ( <i>cash money</i> ) Bantuan sarana *	
		Lain-lain .....	**

\* tuliskan jenis sarannya

\*\* tuliskan bentuk bantuan lainnya

14. Jenang penggajian *ustadz/* tuan guru di pesantren ini:

No	Status	Jenang Penggajian (Rp)	
		Menengah pertama/ MT's	Menengah atas/ MA
01	Guru tetap PNS (DPK)		
02	Guru tetap Yayasan		
03.	Guru honorer		
04.	.....*		

\* tuliskan

15. Besaran gaji personil pesantren berdasarkan jabatan/ tanggung jawab

No	Jabatan/ tanggung jawab	Gaji (Rp)	Total (%)
01	Pimpinan umum/ kyai/ syech		
02	Pimpinan satuan pendidikan		
	- kepala/ direktur		
	- wakil kepala/ direktur		
	- kepala tata usaha		
03	Sekretaris		



	<input type="checkbox"/> Pembelian buku pelajaran/ kitab <input type="checkbox"/> Sumbangan sosial/ kemalangan <input type="checkbox"/> P H B I <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> .....**			
5	Lain-lain**			
	.....			
	.....			
	.....			
	.....			
	.....			
	J u m l a h			

\* tuliskan salah satu

\*\* tuliskan kalau masih ada yang lainnya

	<input type="checkbox"/> Dana kesehatan <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> .....**			
3.	Ruin (tidak dibayarkan ke pesantren): <input type="checkbox"/> Biaya transportasi <input type="checkbox"/> Uang saku <input type="checkbox"/> Pembelian buku dan alat tulis <input type="checkbox"/> Cuci pakaian <input type="checkbox"/> Dana organisasi santri <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> .....**			
4.	Insidental (tidak dibayarkan ke pesantren): <input type="checkbox"/> Pakaian seragam sekolah <input type="checkbox"/> Pakaian shalat/ ibadah <input type="checkbox"/> Pakaian olah raga <input type="checkbox"/> Alat olah raga <input type="checkbox"/> Pembelian sepatu <input type="checkbox"/> Pembelian tas			



No	Jenis Pengeluaran	Ada/ tidak*	Rata-Rata Pengeluaran (Rp)			Total (%)
			2003/04	2004/05	2005/06	
1.	Pengeluaran rutin: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ gaji <i>ustadz</i>/ tuan guru</li> <li>○ gaji pegawai</li> <li>○ biaya listrik</li> <li>○ biaya air</li> <li>○ biaya telepon</li> <li>○ ..... (tuliskan)</li> </ul>					
2.	Pembangunan dan pemeliharaan sarana: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ pembangunan gedung</li> <li>○ pemeliharaan gedung</li> <li>○ pemeliharaan sarana</li> <li>○ pengadaan sarana:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- kamar mandi/ wc</li> <li>- masjid/ mushalla</li> <li>- sarana olah raga</li> </ul> </li> </ul>					

No	Komponen yang dibiayai	Ada/tidak*	Rata-rata pengeluaran santri (Rp)
1.	Rutin (dibayarkan ke pesantren): <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Uang SPP</li> <li><input type="radio"/> Biaya ujian ulangan umum</li> <li><input type="radio"/> Biaya ujian nasional</li> <li><input type="radio"/> Konsumsi/ makan-minum</li> <li><input type="radio"/> Asrama/ pondokan santri</li> <li><input type="radio"/> Biaya praktikum/ laboratorium</li> <li><input type="radio"/> Kegiatan ekstra kurikulum</li> <li><input type="radio"/> .....</li> <li><input type="radio"/> .....</li> <li><input type="radio"/> ..... **</li> </ul>		
2.	Insidental (dibayarkan ke pesantren): <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Uang pangkal/ uang bangunan</li> <li><input type="radio"/> Pakaian seragam/ atribut santri</li> </ul>		



	○ .....**						
5.	Akomodasi santri						
6.	Konsumsi santri: ○ pembelian beras ○ sayur-mayur ○ ikan/daging/telur ○ .....**						
7.	Perpustakaan Pesantren: ○ pembelian buku/kitab ○ photocopy buku/kitab ○ pemeliharaan buku/kitab						
8.	Usaha kesehatan/ klinik						
9.	Kesejahteraan <i>ustadz/ab</i>						
10.	Kesejahteraan pegawai						
11.	Biaya Operasional Tata Usaha Pesantren						
12.	Belanja Barang: ○ kertas ○ alat tulis ○ buku tulis						

	- laboratorium bahasa - laboratorium IPA - ..... - .....**								
3.	Penyelenggaraan Ujian: ○ Penyusunan naskah ○ Penggandaan naskah ○ Koreksi naskah ○ ..... ○ .....**								
4.	Ekstra kurikulum: ○ pramuka ○ praktik ibadah ○ Pengajian kitab ○ les komputer ○ keterampilan ○ kesenian ○ olah raga ○ ..... ○ .....								



20. Strategi yang diempuh pondok pesantren dalam mencari sumber-sumber *unit cost* santi di masa depan:

No	Sumber-Sumber Pembiayaan	Target besaran dana yang diharapkan diperoleh (Rp)	Total (%)
01.	Santri/ orang tua santri		
02.	Yayasan/ lembaga donor		
03.	Pemerintah		
04.	Infag/ wakaf masyarakat		
05.	Lisaha pondok pesantren		
	o Koperasi		
	o Perkebunan .....		
	o Peternakan .....		
	o .....		
Jumlah			

\* tuliskan jenisnya

\*\* tuliskan kalau masih ada yang lainnya

13.	o kapur tulis				
	o penggaris				
	o mesin tik				
	o pita mesin tik				
	o komputer				
14.	o tinta komputer				
	o .....				
	o .....				
	o .....				
	o .....				
15.	Pembinaan/ peningkatan kualitas <i>ustadz/</i> tuan guru:				
	o Penataran				
	o pelatihan				
	o seminar/ workshop				
	o pendidikan lanjutan				
Jumlah					

\* tulis salah satu

\*\* tuliskan kalau masih ada yang lainnya







